

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN

Penelitian dilaksanakan dalam tahun 2005 yang menguraikan mengenai strategi untuk
mengentaskan kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan

OLEH


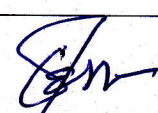
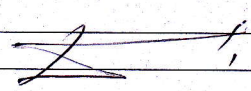
Dr. A. SESSU, M.Si



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA

2005

HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN
2.	Bidang Penelitian	:	ILMU EKONOMI
3.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	DR.A.SESSU,M.Si
	b. Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
	c. NIP	:	131 282 637
	d. Disiplin ilmu	:	MATEMATIKA, PLH, ILMU EKONOMI
	e. Pangkat/Golongan	:	PEMBINA TK I / IV B
	f. Jabatan	:	LEKTOR KEPALA
	g. Fakultas/Jurusan	:	FKIP / MATEMATIKA
	h. Alamat	:	JL.LIMAU JAKARTA SELATAN
	i. Telepon/Faks/E-mail	:	02172795551/ Fax (021)7279551
	j. Alamat Rumah	:	KOMP.VILA INTI PERSADA C2 No 52 PAMULANG TIMUR
	k. Telepon/Faks/E-mail	:	021.7423306/081525901727/dr_andi_s essu yahoo,com
4.	Jumlah Anggota Peneliti	:	1 orang
	Nama Ketua Peneliti	:	DR.A.SESSU,M.Si
5.	Lokasi Penelitian	:	PROVINSI SULAWESI SELATAN
6.	Tanggal penelitian	:	10-8-2006 S/D 5-10 2006
7.	Biaya Penelitian	:	Rp. 6.000.000,00
		Jakarta	5 OKTOBER 2006
	Mengetahui, Dekan FKIP		Ketua Peneliti,
			
	(DR.H.WR.HENDRA SAPUTRA,M.Hum)		(DR.A.SESSU, M.Si)
	NID:AMKA		NIP.131 282 637
		Menyetujui,	
	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,		
			
	(Drs.DANIEL FERNANDEZ,M.Si)		

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah kami memuji-Nya dan perlindungan, petunjuk serta ampunan kepada-Nya, dan kami juga memohon perlindungan kepadaNya dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami sebab sesungguhnya barang siapa yang diberi kepada Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk.

Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang kita teladani dalam kehidupan kita.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan karya tulis ini. Demikian pula dalam penulisan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memberikan bantuan dan arahnya .

Jakarta, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	9
B. Kerangka Pemikiran	32
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Populasi dan Sampel	36
C. Indikator/Parameter Penelitian	37
D. Model Analisis	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Provinsi Sulawesi Selatan	42
B. Gambaran Kemiskinan di Sulawesi Selatan	48
C. Karakteristik Responden	58
D. Hasil Evaluasi	61
E. Hubungan Antar Variabel Penelitian	68
F. Analisis Pemecahan Masalah	70
G. Rekomendasi Kebijakan	73

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
C. Implikasi Kebijakan	98

DAFTAR PUSTAKA	100
----------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk merupakan masalah Internasional dan masalah seluruh umat manusia. Kasusnya di Indonesia pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, jika dibandingkan beberapa negara di dunia yang salah satu penyebabnya adalah karena tingkat fertilitas masih tinggi dan tingkat mortalitas yang telah menurun karena peningkatan kualitas kesehatan.

Setiap penambahan penduduk tidak saja merupakan tambahan pada faktor tenaga kerja yang diharapkan menunjang pembangunan nasional, akan tetapi juga merupakan beban bagi pemerintah jika penambahan penduduk tersebut tidak diiringi dengan usaha meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitasnya baik fisik maupun nonfisik. Kalau penambahan penduduk tetap meningkat setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan pembangunan yang diharapkan dapat mengantisipasi pertumbuhan penduduk tersebut maka jelas akan menimbulkan berbagai kepinganan pada berbagai aspek sosial ekonomi yang umumnya dialami oleh negara sedang berkembang.

Kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi antar lapisan penduduk dalam suatu kelompok masyarakat pada hakikatnya bersumber dari masalah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, setiap upaya mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat tidak terlepas dari upaya menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan itu sendiri. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah, bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit seperti yang dianut oleh kaum neo-klasik mengartikan sebagai masalah ekonomi semata-mata. Kemiskinan adalah konsep yang cair, tidak pasti dan multidimensional (Muchtar, 2005). Kemiskinan harus dilihat dalam pengertian yang luas, yaitu mencakup dimensi ekonomi, sosial-budaya dan politik. Setiap kebijakan yang menekankan pada serangan langsung (*direct attack*) terhadap penyebab kemiskinan merupakan langkah tepat yang perlu mendapat dukungan, baik pada tingkat pemikiran akademik atau kebijakan praktis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan lapisan masyarakat miskin yang secara langsung terkena problem pada khususnya.

Akhir-akhir ini perbincangan mengenai masalah pengangguran dan kemiskinan muncul kembali dan menjadi tema utama diskusi baik bagi kalangan akademisi, praktisi dan aktivis masyarakat. Pengangguran dan Kemiskinan bukan merupakan masalah baru karena sekitar satu dasa warsa yang lalu, masalah ini telah didiskusikan di tingkat nasional dan berbagai kebijakan telah pula ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan pada masa pemerintah kolonial, upaya-upaya penanggulangan persoalan kemiskinan ini telah dilakukan (Nugroho, 1995).

Upaya-upaya untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan pada hakikatnya sudah dilakukan sejak era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, meskipun upaya tersebut masih bersifat makro. Namun sejak Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama hingga saat ini nampak bahwa terjadi pergeseran strategi dan paradigma pembangunan, khususnya dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Pergeseran tersebut merupakan refleksi dari perubahan kontekstual pembangunan nasional itu sendiri. Strategi yang bersifat makro tersebut nampak ketika kebijakan pembangunan nasional lebih bertumpu pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan cara memacu perkembangan sektor swasta atau sector industri. Bersamaan dengan proses pertumbuhan ekonomi juga terjadi proses yang secara diametral bertentangan dengan mekanisme tetesan ke bawah, karena pada sisi lain terjadi juga penyedotan dana lokal ke pusat atau yang disebut *trickle-up*. Fenomena ini merupakan sebuah dialektika pembangunan karena sebetulnya hasil yang diharapkan dari proses pembangunan adalah keadilan sosial, tetapi ada kecenderungan justru lapisan bawah yang menopang perkembangan ekonomi lapisan atas. Fenomena ini dijumpai pada era sebelum harga bahan bakar minyak disesuaikan dengan harga pasar internasional. Kaum kaya lebih banyak menikmati subsidi bahan bakar minyak dimaksud dibandingkan dengan keluarga miskin.

Berbagai upaya untuk menanggulangi atau memberdayakan masyarakat dari pengangguran dan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan jalan merumuskan standar objektif garis pengangguran dan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan pada kantong-kantong kemiskinan. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk menentukan kelompok sasaran, sehingga program pembangunan yang secara khusus menanggulangi kemiskinan dapat dirumuskan lebih akurat.

Tjokrowinoto Moeljarto (1993) mengemukakan bahwa ada beberapa strategi pembangunan yang telah dilakukan dengan maksud memberdayakan masyarakat di Indonesia utamanya dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres.
2. Mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi, dan lain-lain.
3. Menyediakan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapis bawah seperti KUPEDes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas, dan lain-lain.
4. Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya pembangunan pertanian.
5. Pengembangan kelembagaan seperti Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Terpadu (P4KT).
6. Program pengentasan lapisan masyarakat miskin melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang telah dilakukan tersebut belumlah efektif, sehingga sampai sekarang masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk Indonesia, baik di desa atau di kota yang menderita kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran. Ketidakberhasilan itu bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi semata-mata, dan pada sisi lain kaum kulturalis menganggap bahwa kemiskinan bersumber dari budaya tertentu yang mengakibatkan orang menjadi fatalis dan malas. Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan pengangguran dan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lapisan bawah hanya sebatas upaya perbaikan kondisi ekonomi (peningkatan pendapatan) dan perubahan budaya melalui proyek-proyek pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas.

Mengatasi pengangguran dan kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat penganggur dan miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemberdayaan politik bagi lapisan

masyarakat penganggur dan miskin merupakan suatu yang tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan politik bagi lapisan masyarakat penganggur dan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan apabila pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dikehendaki. Lapisan masyarakat penganggur dan miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena berbagai hal suara kelompok ini terpendam dalam struktur politik. Oleh karena itu, agar dapat keluar dari permasalahan penganggur dan kemiskinan, maka pemberdayaan sosial - politik sangat diperlukan sehingga masyarakat penganggur dan miskin mampu bersuara dalam struktur sosial - politik. Semakin tinggi akses politik yang dimiliki oleh lapisan masyarakat penganggur dan miskin, maka semakin tinggi pula akses ekonomi yang dapat dimiliki, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengentas dirinya dari problem penganggur dan kemiskinan yang dihadapi.

Dalam banyak kasus, masyarakat miskin atau masyarakat marginal di Indonesia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pihak yang lebih kuat dan memiliki posisi tawar yang rendah terhadap kelas sosial di atasnya. Studi yang dilakukan Suyanto, dkk (2001) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin umumnya buta hukum, jauh dari akses pelayanan publik, terisolasi dari informasi dan koneksi, dan tidak memiliki patron yang kuat, sehingga sangat tergantung pada sedikit sumber penghasilan tertentu. Akibat kerentanan yang diderita, kelompok masyarakat miskin tersebut sering jatuh sakit, lemah jasmani, dan hal ini cenderung terjadi terus-menerus akibat konsumsi yang kurang layak dan jauh dari syarat-syarat kesehatan dan gizi produktif yang seimbang.

Selain persoalan permodalan, masalah lain yang dihadapi usaha produktif masyarakat miskin adalah persoalan teknologi. Masalah teknologi antara lain berkaitan dengan cara perolehan bahan baku, pengolahan dan kondisi teknologi yang digunakan. Teknologi perolehan bahan baku berkaitan dengan belum adanya teknologi informasi yang memudahkan untuk memperoleh bahan baku dengan mudah dan cepat. Masalah lain adalah pemasaran yang masih belum memperhitungkan biaya produksi secara lebih terinci. Akibatnya keuntungan riil yang diperoleh para pelaku usaha produktif pada umumnya masih belum merupakan hasil bersih. Skala pemasaran yang dilakukan juga

masih bersifat lokal, dan menunjukkan bahwa usaha produktif masyarakat miskin belum dikelola dengan cara manajemen yang modern dan profesional.

Pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah dilakukan melalui program-program pembangunan, khususnya melalui dana-dana APBD kepada kelompok masyarakat miskin yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun belum menunjukkan hasil yang optimal yang dibuktikan dengan tetap meningkatnya jumlah masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang teridentifikasi menghambat pengentasan kemiskinan selama ini antara lain masih belum terkoordinasinya pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, terdapatnya keragaman data, belum sinkronnya regulasi dan kebijakan yang diterapkan, masih rendahnya koneksitas antara strategi dan implementasi program, serta kesinambungan program yang masih parsial bahkan bersifat formalitas dan rutinitas. Jika hal tersebut tidak diantisipasi lebih dini, maka akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan dimasa mendatang. Demikian juga terhadap penanggulangan kemiskinan secara ekonomi dianggap gagal yang akan menimbulkan kerawanan sosial dan politik sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 – 2003
(Persentase Terhadap Total Penduduk Provinsi)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin Jiwa	Rincian Menurut Lokasi			
			Perkotaan		Pedesaan	
			Jiwa	%	Jiwa	%
2000	7.771.991	1.198.000 (15,44)	341.420	15,59	856.580	15,44
2001	7.891.792	1.296.300 (16,50%)	177.260	7,65	1.11.040	20,21
2002	7.960.991	1.309.230 (15,88%)	176.950	7,16	1.132.280	19,61
2003	8.213.864	1.301.800 (15,85%)	173.400	7,15	1.128.500	19,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan selama empat tahun terakhir (Tahun 2000–2003) berdasarkan persentase terhadap total penduduk di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, baik rincian menurut lokasi perkotaan maupun menurut lokasi pedesaan. Namun ditinjau dari persentase

terhadap total penduduk di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2003 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2000 sebesar 15,41%, tahun 2001 sebesar 16,42%, tahun 2002 sebesar 16,44%, dan tahun 2003 penduduk miskin menjadi sebesar 15,85%. Selain itu, tergambar pula bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebagian besar berada di wilayah pedesaan, yaitu rata-rata sekitar 82,76% per tahun dari total penduduk miskin di Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2004

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapital/Bulan)	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
01	Selayar	25.10	24.50	22,92	22,18	97.342	101.880
02	Bulukumb	54.90	53.20	14,79	14,20	88.686	102.434
03	a	18.20	17.00	11,04	10,22	75.092	90.826
04	Bantaeng	77.10	74.50	23,86	22,78	119.504	103.839
05	Jeneponto	36.30	31.70	15,09	12,99	99.039	107.548
06	Takalar	99.90	94.10	18,10	16,69	102.471	94.820
07	Gowa	32.20	30.20	14,88	13,83	98.331	93.216
08	Sinjai	62.30	59.90	21,78	20,63	16.116	120.118
09	Maros	63.50	61.70	23,07	22,29	112.183	129.274
10	Pangkep	20.20	17.90	12,88	11,39	112.122	110.261
11	Barro	112.60	107.4	16,56	15,66	93.975	98.742
12	Bone	12.00	10.30	5,35	4,60	96.104	93.930
13	Soppeng	39.10	35.10	10,78	9,66	108.338	120.429
14	Wajo	22.20	19.90	9,02	8,09	99.229	103.429
15	Sidrap	31.00	29.50	9,35	8,84	107.253	106.588
16	Pinrang	38.50	38.10	21,90	21,33	108.021	126.266
17	Enrekang	61.70	57.30	20,35	18,59	111.763	118.965
18	Luwu	79.70	78.10	19,13	18,54	111.153	98.084
19	Tana	41.80	40.70	15,51	14,70	94.333	100.686
20	Toraja	26.00	26.10	13,49	13,12	96.383	101.568
21	Luwu	81.40	71.60	7,11	6,15	121.348	123.809
22	Utara	7.70	7.80	6,85	6,87	113.459	113.993
23	Luwu	15.10	14.00	12,33	11,25	117.972	133.212
	Timur						
	Makassar						
	Pare-Pare						
	Palopo						
Sulawesi Selatan		1.085,5 0	1.000, 6	15,05	14,11	104.357. 26	108.431,2 0

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, data diolah, Tahun 2005

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2003 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2002 untuk setiap Kabupaten/Kota. Garis kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan terjadi peningkatan pada tahun 2004 dibanding pada tahun 2003.

Pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan kajian yang sifatnya komprehensif, sehingga didalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan pengembangan model yang sudah ada atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dalam pengembangan model pengentasan kemiskinan, tidak hanya memfokuskan perhatian terhadap bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masyarakat dan sekaligus mendorong ke arah bagaimana memotivasi masyarakat untuk hidup dan berusaha secara produktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian difokuskan pada "Strategi dan Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Selatan".

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

- Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penduduk atau keluarga miskin di Provinsi Sulawesi Selatan?
- Apakah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait selama ini telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di Sulawesi Selatan?
- Bagaimanakah strategi dan model, atau kebijakan yang efektif untuk diterapkan dalam usaha mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penduduk atau keluarga miskin di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh lembaga atau instansi pemerintah terkait selama ini dalam upaya menurunkan jumlah penduduk atau keluarga miskin di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menentukan model atau tindakan yang efektif untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan bagi lembaga atau instansi terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
2. Sebagai suatu skenario pengentasan kemiskinan yang menggambarkan tentang sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, mengandung materi yang berpihak kepada masyarakat miskin dan memberi peran, peluang, akses yang sama pada setiap keluarga miskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perumusan Strategi dan Model Kebijakan

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*" dengan akar kata "*stratos*" dan "*ag*" dimana *stratos* berarti militer dan *ag* berarti memimpin. Pada awalnya strategi diartikan *generalship*, sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan (Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999). Tidaklah mengherankan jika pada awalnya strategi selalu dikaitkan dengan siasat yang disusun untuk menghadapi perang pemasaran dan memenangkan pertarungan. Namun demikian, sesudah 1950-an makna strategi berubah. Russel dan Taylor (2000) menyatakan bahwa strategi adalah visi umum yang menyatukan organisasi, menyediakan acuan konsistensi dalam pembuatan keputusan, dan akan tetap menjaga agar perusahaan atau organisasi bergerak pada arah yang benar. Selanjutnya Chase dan Aquilano (1995) menyatakan, bahwa strategi operasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan penentuan kebijakan dan rencana umum untuk memanfaatkan sumberdaya perusahaan atau organisasi agar dapat mendukung sebaik-baiknya strategi bersaing jangka panjang. Lebih lanjut, Chase, Aquilano, dan Jacobs (2001) menjelaskan bahwa strategi berhubungan dengan proses jangka panjang yang harus memperhatikan perubahan dimasa datang yang pasti terjadi. Strategi berhubungan dengan keputusan disain mengenai proses, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses yang bersangkutan. Disain proses mencakup pemilihan teknologi atau metode yang sesuai, skala kegiatan selama perjalanan waktu, peranan sediaan sumberdaya, dan pemilihan lokasi tempat pelaksanaan proses kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, keputusan mengenai infrastruktur menyangkut pemikiran logis yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan pengendalian, penjaminan dan pengendalian mutu, struktur pembiayaan, dan penataan struktur organisasi dari fungsi yang disertai tugas pelaksanaan.

Dari pengertian tersebut di atas, maka strategi pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai suatu upaya sistematis untuk melaksanakan suatu rencana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Sehubungan dengan itu, untuk

melaksanakan strategi dengan baik, maka organisasi memerlukan model dan model dimaksud menjadi infrastruktur dari strategi. Menurut J.H. Adam (1982) model sebagai cara adalah berarti suatu metode yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Disisi aplikasi, J.M. Rosenberg (1993) menyatakan, bahwa *model of development* bermakna, sesuatu yang teruji sebagai kunci rahasia atau kiat tentang bagaimana cara melakukan sesuatu untuk mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya Augusty Ferdinand (2002) mengemukakan pengertian model dari sisi relasi matematik, yaitu merupakan diagram yang menyatakan hubungan atau alur (*path*) dari variabel yang dihipotesiskan. Model dari sisi ini dibedakan atas model deskriptif dan model kausal. Model deskriptif adalah model yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu konsep atau sebuah keadaan. Model kausalita adalah model yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anonim, 1990) dinyatakan bahwa model adalah pola atau acuan atau ragam dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan.

Berdasarkan beberapa pengertian model di atas, maka dalam penelitian ini model diartikan sebagai pola, cara, atau metode yang akan digunakan dalam usaha mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Model ini dirumuskan untuk tujuan menyukkseskan pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan melalui berbagai program.

Strategi disatu sisi mempunyai ciri-ciri : (a) strategi adalah suatu rumusan kebijakan jangka panjang, dan (b) strategi memiliki rumusan tujuan yang jelas yang disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Untuk keperluan itu, dalam usaha pengentasan kemiskinan, harus jelas tujuan yang hendak dicapai, misalnya menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 30% dalam tahun 2006, dan 45% dalam tahun 2007. Cara yang dibutuhkan untuk dipakai mendukung pencapaian tujuan itu adalah model pengentasan.

2. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan muncul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya, pengukuran dan penentuan garis batas seseorang atau keluarga disebut miskin yang hingga kini menjadi perdebatan. Tidaklah mudah

untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar berada di atas garis batas kemiskinan, atau berapa kalori yang dikonsumsi per hari agar tidak lagi dikategorikan sebagai warga miskin. Jadi dalam hal ini kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai orang yang secara kuantitatif atau obyektif (apabila dihitung pendapatannya dengan rupiah) tergolong miskin, tetapi karena tinggal dalam lingkup budaya tertentu, orang tersebut merasa tidak miskin. Bahkan merasa cukup dan justru berterima kasih pada nasibnya.

Saat ini terdapat banyak cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Nugroho (1995) membagi cara pengukuran tingkat kemiskinan dengan dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis kemiskinan. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat sebagai kebiasaan, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu masyarakat dan berbagai faktor lainnya.

Pada kemiskinan relatif, orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti "tidak miskin". Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek-aspek materil saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non materil. Dengan demikian, mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena yang pada dasarnya bersifat “*multi-facet*” atau “*integrated poverty*”.

Robert Chambers (dalam Loekman Soetrisno : 1995) mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai “*deprivation trap*” atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* itu terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu :

- a. Kemiskinan itu sendiri
- b. Kelemahan fisik
- c. Keterasingan
- d. Kerentanan
- e. Ketidakberdayaan.

Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga tersebut. Kerentanan ini sering menimbulkan “*poverty rackets*” atau roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda yang berharga sehingga keluarga itu menjadi semakin jauh masuk kedalam lilitan kemiskinan. Ketidakberdayaan keluarga miskin tercermin dalam kasus dimana elite desa yang dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai jaring yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin juga dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu oleh orang yang mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik dan ekonomi, dan lemahnya keluarga miskin *to bargain*. Ketidakberdayaan keluarga miskin inipun dapat menjadikan keluarga miskin secara cepat menjadi lebih miskin.

Meskipun dijumpai berbagai macam definisi kemiskinan, namun secara konvensional, kemiskinan hanya dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (*income*) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Zikrullah, 2000). Hal ini setidaknya terlihat pada batasan yang dikemukakan UNDP (1997) dalam Cox (2004), bahwa seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Dengan memakai konsep itu sebagai

pegangan, maka berbagai usaha pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan di dunia ketiga, hanya mengarah pada usaha meningkatkan pendapatan mereka. Hasilnya secara umum tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal (Muchtar, 2005).

Sehubungan dengan hal itu, Max Neef dalam Zikrullah (2000) yang dikutip oleh Muchtar (2005) menyatakan, sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu : (a) kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal, (b) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hal, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan, (d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas; (e) kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antara kelompok sosial, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman, baik ditingkat pribadi maupun ditingkat komunitas.

Memperhatikan sifat multidemensi dari kemiskinan ini, maka dalam prog-ram pengentasannya haruslah memperhatikan usaha mengatasi : (a) keterbatasan akan kesempatan mendapatkan bahan konsumsi yang layak, cukup, dan harga terjangkau, (b) meningkatkan kesempatan kepada anak-anak warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang gratis tetapi berkualitas, (c) memperluas dan mempermudah kesempatan kaum miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan, (d) memulihkan rasa percaya diri mereka sebagai sumber daya insani yang sangat berharga sebagai modal untuk mengatasi rasa *powerless* (ketidakberdayaan), (e) memberikan perlindungan dan kesempatan kepada kaum miskin untuk menjalankan usaha informal produktif (sekalipun sebagai usaha kaki-lima), dan (e) menyediakan dana pinjaman bergulir dalam usaha memenuhi kebutuhan permodalan usaha produktif mereka. Usaha-usaha sedemikian itu harus dilakukan secara terintegrasi dan simultan dan bukan usaha pengentasan yang sporadis yang musiman.

Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan ada empat belas indikator kemiskinan, yaitu : (a) luas bangunan, (b) jenis lantai, (c) jenis dinding, (d) fasilitas buang air besar, (e) sumber air minum, (f) sumber penerangan, (g) jenis bahan bakar untuk memasak, (h) ;

frekuensi membeli daging, ayam, dan susu seminggu, (i) frekuensi makan sehari, (j) jumlah stel pakaian baru yang dibeli per tahun, (k) akses ke Puskesmas atau poliklinik, (l) lapangan pekerjaan, (m) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan (n) kepemilikan beberapa asset. Selanjutnya, BPS juga menetapkan kriteria garis kemiskinan, yaitu : (a) Penduduk sangat miskin bila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 kalori per orang per hari, plus kebutuhan dasar non makanan setara dengan Rp120,000 per orang per bulan. (b) Penduduk miskin, bila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 sampai 2.100 kalori per orang per hari, plus kebutuhan dasar non makanan setara dengan Rp150,000 per orang per bulan, dan (c) Penduduk mendekati miskin, bila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 2.100 sampai 2.300 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non makanan setara dengan Rp175,000 per orang per bulan.

Kategori untuk rumah tangga miskin adalah : Bila rumah tangga mempunyai rata-rata empat orang, maka batas kemiskinan adalah : (a) sangat miskin bila mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal $4 \times \text{Rp}120,000 = \text{Rp}480,000$ per rumah tangga per bulan, (b) miskin, bila mampu memenuhi kebutuhan dasar hanya mencapai $4 \times \text{Rp}150,000 = \text{Rp}600,000$ per rumah tangga per bulan, dan (c) mendekati miskin bila mampu memenuhi kebutuhan dasar hanya mencapai $4 \times \text{Rp}175,000 = \text{Rp}700,000$ per rumah tangga per bulan.

Dalam penelitian ini, pengkategorian penduduk miskin dan rumah tangga miskin akan didasarkan pada kriteria BPS. Pilihan itu dilakukan karena dalam praktek di negara kita, bantuan tunai langsung dari kompensasi BBM kepada penduduk miskin adalah didasarkan pada kriteria BPS.

3. Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya dan politik). Karena sifat multidimensinal tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami seberapa besar

kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif.

Ellis (1984) mengemukakan dimensi-dimensi yang terkait dengan gejala kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.
- b. Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini, sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Untuk itu, serangan terhadap kemiskinan sama artinya dengan pengikisan budaya. Apabila budaya tersebut tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomik juga sulit ditanggulangi.
- c. Kemiskinan berdimensi struktural atau politik, artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktural sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan di atas pada hakikatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, dan bersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Hal ini sejalan dengan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahkan yang dikejar bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya, dan politik).

4. Penyebab Kemiskinan

Menurut akar penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan, secara teoretis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah,

yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron client*, jiwa gotong royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan dalam banyak hal terjadi karena bukan seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa bekerja keras, (karena itu disebut pula kemiskinan struktural). Menurut Soemardjan (1984), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoretis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka termasuk ke dalam golongan miskin yang tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural, itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut *unskilled labour*. Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah (Soedjatmoko, 1986). Di kota seperti Surabaya, golongan masyarakat miskin ini umumnya tinggal di rumah-rumah petak atau permukiman kumuh yang padat, berjejal dan sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal.

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya walaupun terjadi sifatnya lamban sekali; apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada lingkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar dapat melepaskan diri dari kemelaratan.

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud (1994), adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam

menurunkan kemampuan si miskin untuk *bergaining* dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak dapat mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual pendek kata pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Pengertian dan definisi kemiskinan struktural, kendati menjadi alternatif konsep yang lebih disukai ilmuwan sosial. Tetapi, kelebihan definisi seperti yang dikemukakan Soemardjan (1984) di atas diakui atau tidak sesungguhnya cenderung bersifat ideologis dalam arti definisi di atas populer karena disana ada semangat dan nilai-nilai yang menggugat kemapanan dan status quo. Secara konseptual, definisi kemiskinan yang dikemukakan Selo Soemardjan sedikit-banyak bersifat normatif. Parsudi Suparlan, misalnya, seorang antropologi yang menyunting kumpulan tulisan tentang kemiskinan di perkotaan, dengan lugas menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan Selo Soemardjan kurang tajam dan tidak masuk akal (Suparlan, 1984).

5. Perangkap Kemiskinan

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual adalah dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Pendapat Robert Chambers tersebut, telah diketengahkan selengkapnyanya dalam uraian terdahulu.

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin sering mampu tetap bertahan dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang anak atau keluarga yang jatuh pada lingkaran setan atau perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak dapat ikut menikmati hasil yang pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan (Suyanto, 1996).

Secara empirik, banyak bukti memperlihatkan bahwa naiknya penduduk di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti penduduk tersebut hidupnya benar-benar bebas

dari ancaman dan perangkap kemiskinan, melainkan penduduk tersebut sebenarnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang terendah yaitu tahap *destitute* ke tahap apa yang disebut sebagai *near poor*. Dibandingkan dengan kelompok kemiskinan *destitute*, kelompok *near poor* ini menghadapi suatu krisis, maka dengan cepat kelompok *near poor* ini melorot lagi ke status *destitute*. Sebuah keluarga petani yang termasuk kelompok *near poor* tidak mustahil terpaksa turun kelas menjadi kelompok *destitute* bila tanpa diduga panen mereka tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau karena onjloknya harga jual di pasaran akibat ulah spekulasi gabah.

Dalam kenyataan bahkan acap kali terjadi, kelompok masyarakat yang termasuk cukup atau kaya bukan kelompok *near poor* tiba-tiba harus mengalami penurunan status yang drastis, yakni masuk ke dalam kelompok "keluarga miskin baru". Jadi, berbeda dengan kesan dan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini yang menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa turun dari waktu ke waktu, dalam kenyataan justru tidak jarang terjadi penambahan jumlah orang miskin. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto di sejumlah daerah di Jawa Timur menemukan bahwa kelompok masyarakat yang selama dua – tiga tahun terakhir terpaksa turun statusnya dari kelompok cukup menjadi "keluarga miskin baru" adalah kelompok petani cengkeh dan petani garam (Suyanto, 1996). Studi yang dilakukan Bagong Suyanto tersebut, walau dengan jumlah sampel yang terbatas, namun membuktikan bahwa usaha untuk memberantas kemiskinan memang bukan hal yang mudah sebab apa yang dialami keluarga dan masyarakat miskin bukan sekedar kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya modal usaha saja, tetapi lebih dari itu yang sesungguhnya membelenggu keluarga dan masyarakat miskin adalah apa yang disebut Robert Chambers dengan istilah perangkap kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan.

6. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Diluar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi

nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program Tekesra-Kukesra, KURK, membangun infrastruktur di permukiman kumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak dapat diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995), pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk dapat ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari.

Disamping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurang dibangunnya ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Sering terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Dalam konteks ini, dibutuhkan sebuah prakarsa baru, yaitu program yang akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam aktivitas ekonomi. Prakarsa baru dimaksud harus berisi program yang bertujuan untuk lebih memandirikan dan memberdayakan komunitas masyarakat miskin di tingkat lokal. Melalui pemberdayaan, maka masyarakat miskin akan memiliki kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan sendiri persoalan kemiskinan yang melilitnya. Prakarsa baru dimaksud sudah dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan pemerintah, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Provinsi. Kebijakan Pemerintah Pusat antara lain dalam bentuk Inpres Desa Tertinggal, ekonomi kerakyatan, dan kebijakan kredit candak-kulak, kemudian disusul dengan kebijakan kredit usaha mikro. Melalui Keluarga Berencana dikenal program Takesra, Kukesra, dan KPKU sebagai wahana peningkatan kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal, umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah pada umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya (Karnaji, dkk 2000). Kendati secara harfiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan dan program Jaring Pengaman Sosial berbeda-beda, tetapi substansinya sesungguhnya hampir sama, yakni memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Dalam jangka pendek, pemberian bantuan ekonomi itu bermanfaat. Tetapi, untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan permasalahan-problem baru yang tidak kalah rumitnya. Bahkan, tidak mustahil terjadi, dengan diperolehnya bantuan modal berupa pinjaman kredit, justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin (Mubyarto, 1995). Salah satu penyebabnya adalah berpangkal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi, disisi lain, kesalahan juga dapat bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat miskin, sering menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh bukan untuk kegiatan produktif, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif (Chambers, 1987).

Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto (1991-1995) tentang peran berbagai lembaga kredit pedesaan seperti Perum Pegadaian, BPR, lembaga KURK, Kredit Usaha Tani, dan sebagainya yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kegiatan

produktif masyarakat, menemukan, ternyata banyak nasabah yang memanfaatkan kredit yang diperolehnya itu bukan untuk kegiatan produktif, melainkan yang sifatnya konsumtif, terutama untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tekanan kebutuhan sehari-hari yang senantiasa mengancam dan kewajiban untuk menghidupi anak dan sebagainya telah membuat banyak keluarga atau golongan masyarakat miskin sulit untuk mengembangkan usahanya.

Sementara itu, studi yang dilakukan Karnaji dkk (2000), dalam batas-batas tertentu menemukan bahwa implementasi Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) di lapangan ternyata tidak selalu seperti yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu : (a) belum jelasnya siapa kelompok sasaran yang diprioritaskan, (b) masih adanya ego sektoral di masing-masing departemen, dan (c) orientasi program yang belum bersifat kontekstual. Dapat dipahami, dengan adanya berbagai kelemahan dimaksud, pelaksanaan berbagai program penghapusan kemiskinan belum memperlihatkan hasil daya ungkit yang memadai. Bahkan, dalam beberapa hal, pelaksanaan program GERDU TASKIN yang semula diharapkan dapat memberdayakan penduduk miskin, kenyataannya justru melahirkan bentuk ketergantungan baru. Berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, justru menyebabkan pelaksanaan Program GERDU TASKIN menjadi tidak efektif. Kelemahan lain dari pelaksanaan berbagai program GERDU TASKIN adalah pada segi proses dan transparansinya. Ada kesan kuat, sebagai akibat dari kurang mantapnya proses persiapan, khususnya program JPS, menyebabkan tahap penting dalam pelaksanaan Program GERDU TASKIN seperti keharusan untuk melakukan sosialisasi program menjadi kurang matang, dan pada akhirnya menyebabkan keterlibatan masyarakat untuk dapat ikut melakukan kontrol sosial menjadi lemah. Meski sulit untuk diquantifikasi, tetapi dalam banyak kasus sering ditemukan, bahwa dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, terdapat berbagai kerawanan, yaitu rawan penyimpangan dan rawan kebocoran.

7. Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di beberapa perkotaan sesungguhnya tidak terlalu berbeda dengan persoalan kemiskinan di pedesaan. Ciri-ciri yang menandai masyarakat miskin di kota umumnya adalah rentan, marginal, inferior, dan juga rawan diperlakukan

salah. Rentan, karena mereka biasanya tidak memiliki penyangga ekonomi yang cukup, sehingga sangat mudah kehilangan aset produksi dan terjerat utang yang membuat mereka makin terpuruk. Marginal, karena mereka tersisih atau disisihkan dari kemungkinan untuk memberdayakan diri, baik dalam kehidupan sosial maupun kegiatan produktif. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap berbagai bentuk layanan dan fasilitas publik kota. Akses mereka terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, listrik dan sebagainya seringkali terhambat, dan bahkan tak jarang mereka harus membayar lebih mahal daripada tarif standar yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud rawan diperlakukan salah adalah mereka cenderung tidak berdaya, berpendidikan rendah, dan secara sosial terisolir, sehingga selain potensial menjadi obyek eksploitasi kelas ekonomi di atasnya, juga sering menjadi obyek penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun yang membedakan kemiskinan di kota dan di desa adalah pada *setting* sosial lingkungan kota yang lebih kompetitif, plural, tidak ramah, dan bersifat kontraktual. Berbeda dengan suasana di pedesaan di mana tekanan kemiskinan seringkali dapat dieliminasi oleh adanya mekanisme subsistensi, garansi sosial dari kerabat dan hubungan personal antar warga masyarakat di kota besar, kehidupan dan interaksi sosial warga satu dengan yang lain cenderung lebih individualistik, impersonal, dan komersial. Di kota besar, permasalahan pengentasan kemiskinan relatif lebih rumit, sebab selain harus memprioritaskan pada warga masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh, kampung-kampung yang padat, dan masyarakat daerah pinggiran kota yang sering menjadi korban suksesi pemilikan lahan akibat penetrasi modal kekuatan komersial, Pemerintah Kota tampaknya tidak dapat mengabaikan begitu saja kehadiran kaum migran yang dari waktu ke waktu tampak makin banyak jumlahnya.

Untuk mempertajam fokus program dan sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di kota, yang dibutuhkan bukan sekadar program yang sifatnya karitas atau bantuan-bantuan paket modal yang sifatnya parsial, tetapi yang dibutuhkan adalah langkah-langkah yang terpadu dan benar-benar fungsional dalam mendukung upaya pemberdayaan penduduk miskin itu sendiri, khususnya di kalangan keluarga yang secara sosial rentan, dari segi kesehatan rapuh, dan yang memiliki akses teramat kecil di bidang pendidikan. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan

agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama dari pelaksanaan program-program pembangunan yang umumnya rawan bias dan a-historis diantaranya adalah: (a) Mempertajam fokus kelompok sasaran, (b) Menghindari kebijakan yang bersifat meritokratis, (c) Mengembangkan program perlindungan yang efektif bagi masyarakat miskin kota, (d) Mengembangkan efisiensi kegiatan produksi dan mendukung upaya diversifikasi usaha masyarakat miskin di kota, (e) Mengembangkan program intervensi yang lebih berorientasi pada pemberdayaan, dan (f) Melakukan program penanganan yang konsisten, (g) Pemberdayaan kontrol dan prakarsa lokal.

a. Mempertajam Fokus Kelompok Sasaran

Salah satu kelemahan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah pada persoalan konsistensi fokus kelompok sasaran. Selama ini, kebiasaan yang dilakukan adalah masing-masing dinas atau instansi menentukan sendiri-sendiri kelompok mana yang menjadi sasaran prioritas. BKKBN misalnya memakai hasil pendataan tahapan keluarga sejahtera sebagai dasar penentuan kelompok sasaran. Sementara itu, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan biasanya tidak memakai mentah-mentah hasil pendataan BKKBN itu, tetapi mereka juga berusaha melakukan pendataan sendiri dengan pertimbangan fokus sasaran mereka agak berbeda. Selain pemborosan anggaran karena tiap-tiap instansi harus menyediakan tenaga, waktu dan dana sendiri-sendiri untuk keperluan pendataan awal kelompok sasaran, kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri ini acapkali menyebabkan dampak program menjadi parsial karena sifatnya tidak terpadu.

Untuk menghindari inefisiensi dan kesamaan fokus kelompok sasaran, perlu dipikirkan langkah-langkah untuk melakukan pendataan kelompok sasaran dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai instansi. Dari segi sosial kita dapat memakai hasil pendataan keluarga sejahtera dari BKKBN, namun instrumen pendataan perlu ditambah dengan indikator lain dari segi pendidikan dan kesehatan. Jadi, kalau dirumuskan, keluarga miskin yang seharusnya diprioritaskan sebagai kelompok sasaran seyogyanya adalah keluarga Pra-Sejahtera, tidak memiliki aset produksi yang layak khususnya adalah kelompok keluarga buruh industri kecil, buruh nelayan, buruh tani, dan buruh pabrik, serta pedagang kecil, memiliki anak yang putus sekolah atau anak

yang bekerja, dan dari segi kesehatan anggota keluarga miskin tersebut termasuk kategori kurang gizi atau sering sakit.

Dengan mempertajam fokus kelompok sasaran ini, maka yang diharapkan adalah upaya-upaya pengentasan kemiskinan atau program pembangunan sektor sosial lain benar-benar dapat terarah, dan menjangkau lapisan masyarakat yang berada di level paling bawah : paling miskin di antara kelompok masyarakat miskin yang ada. Dikhawatirkan adalah bila fokus kelompok sasaran tidak terfokus, maka biasanya program akan rawan bias, dan tidak mustahil jatuh kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak. Betapa pun, pengalaman bias dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program IPS seyogyanya menjadi pelajaran berharga yang tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang.

b. Menghindari Kebijakan Meritokratis

Sejak awal seyogyanya disadari bahwa persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sosial penduduk bukanlah fenomena *single dimension* sebagai masalah kekurangan pendapatan atau modal berusaha saja, melainkan harus dipahami sebagai fenomena *multidimension*. Kemiskinan di sini bukan sekadar persoalan kurangnya atau akses seseorang yang rendah terhadap lalu lintas uang dan barang. Tetapi, kemiskinan sesungguhnya juga terkait dengan empat dimensi yang lain, yaitu : kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi dan ketidakberdayaan atau yang disebut Robert Chambers (1987) dengan istilah *integrated poverty* atau perangkat kemiskinan.

Untuk menjamin efektivitas sebuah kebijakan, bantuan atau program sosial apapun yang ditujukan kepada keluarga miskin harus benar-benar terfokus kepada keluarga miskin yang berada di lapis paling bawah, di saat yang sama pelaksanaan program tersebut harus dibarengi dengan upaya-upaya perlindungan yang memihak. Program pembangunan sektor sosial dalam bentuk apapun, entah bantuan modal usaha, bantuan teknologi atau proses pendampingan harus dapat merangsang perkembangan kegiatan produktif keluarga miskin, tidak mustahil akan bersifat *meritokratis* karena tidak didukung oleh kesiapan basis sosial massa secara merata. Dapat dibayangkan, bagaimana mungkin seorang pengusaha industri kecil konveksi misalnya, dapat bersaing dengan perusahaan garmen besar yang sudah memiliki aset lebih, baik dari segi modal, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Seperti dikatakan Vic George dan Paul Wilding (1992), kebijaksanaan yang berorientasi pertumbuhan dan hanya mengutamakan kesamaan kesempatan berkompetisi, secara konseptual berlawanan dengan pendekatan pembangunan yang berdimensi kerakyatan, dan semakin kehilangan daya tariknya karena telah terkumpul banyak bukti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang egaliter ternyata telah membuahkan hasil yang tidak egaliter. Kedua ahli ini juga menyatakan bahwa kebijaksanaan yang terlalu menekankan unsur persamaan kesempatan saja cenderung bersifat *meritokratis*. Penekanan lebih ditujukan pada persamaan dalam bersaing daripada persamaan dalam hasil yang dicapai. Jadi, semacam turunan langsung dari individualisme yang dibalut dan dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara nilai *laissez-faire* dan persamaan.

c. Perlindungan yang Efektif Bagi Masyarakat Miskin Kota

Kemiskinan sesungguhnya terjadi bukan sekedar karena kelemahan mental, tidak dimilikinya etos wirausaha atau faktor-faktor internal dari orang miskin itu sendiri. Perlu disadari bahwa fenomena “lingkaran kemiskinan” bukanlah satu kawasan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan fenomena “kawasan berlebihan”. Banyak bukti menunjukkan, bahwa kemiskinan dan proses pemiskinan pada dasarnya justru terjadi sebagai akibat dari proses eksploitasi atau pengambilan hak secara kurang adil dari milik atau hak orang-orang miskin. Posisi tawar-menawar yang lemah, ketidakberdayaan dan tidak dimilikinya akses terhadap hukum dan perlindungan sosial yang memadai adalah faktor utama yang menyebabkan penduduk miskin seringkali mudah diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran dari perlakuan-perlakuan yang merugikan mereka.

Untuk memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin agar dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka secara adil, dibutuhkan bentuk-bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang benar-benar nyata. Di tingkat makro, salah satu bentuk perlindungan yang dibutuhkan adalah perlu segera diimplementasikan Undang Undang Anti-Monopoli atau berbagai bentuk pembatasan lain yang dapat secara efektif mencegah kemungkinan terjadinya intervensi dari kekuatan komersial besar yang merugikan penduduk miskin. Penjaminan hak bagi rakyat atas tanah misalnya, adalah

bentuk lain perlindungan sosial yang dibutuhkan penduduk miskin agar mereka tidak menjadi korban penggusuran yang merugikan. Di samping itu, pada tingkat mikro layak pula dipikirkan cara-cara yang efektif untuk mencegah agar peran tengkulak atau tukang ijon tidak berdampak merugikan bagi penduduk miskin. Pendek kata, bagi keluarga miskin yang mereka butuhkan adalah jaminan agar mereka dapat memperoleh harga yang adil atas komoditi yang mereka hasilkan.

d. Berorientasi Pada Pemberdayaan

Program pembangunan seyogyanya tidak terjebak pada program-program yang sifatnya karitatif dan punitif melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang lebih berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered, participatory, empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, menurut Indrasari Tjandraningsih (1996), mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Menurut David C. Korten (1984), untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar adalah sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi berorientasi pada potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni : (1) memusatkan pemikiran pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas, (2) mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem

swa-organisasi, dan (3) mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran kepada individu bukan sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa, kearifan dan perbedaan lokal. Karena itu ia mendukung sistem-sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya.

e. Efisiensi dan Diversifikasi Usaha

Kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka terlalu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Selama ini, banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia memang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi seperti program motorisasi perikanan atau masuknya huller di desa-desa, misalnya yang diberikan pemerintah meskipun dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat miskin. Namun, sangat kelihatan bahwa dibalik itu maksud yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peraihan devisa. Bahkan, yang lebih tragis sering terjadi tindakan yang dilakukan pemerintah atas nama pembangunan bukan memberikan manfaat yang nyata bagi usaha pengentasan kemiskinan, melainkan justru berdampak menggerogoti kemampuan swadaya lokal. Penetrasi teknologi dan bantuan modal usaha ke berbagai wilayah dan komunitas masyarakat miskin, di satu sisi telah berhasil mendongkrak angka-angka produksi dan mengantarkan Indonesia ke tahap swasembada dalam berbagai sektor produksi. Namun, tak dapat diingkari bahwa kesenjangan di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus modernisasi.

Sebagai salah satu alternatif dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan adalah pola untuk mengembangkan usaha kecil dengan cara melakukan efisiensi proses produksi. Suatu unit kerja sektor industri kecil, misalnya, mampu menjual hasil produksinya dalam jumlah yang sama setiap hari. Namun, yang kemudian harus dipikirkan adalah bagaimana menjadikan unit kerja tersebut dapat memetik keuntungan yang lebih besar dari kondisi sebelumnya. Dengan bantuan teknologi produksi dan perbaikan manajemen, diharapkan proses produksi dapat berlangsung lebih irit dan efisien, sehingga hasil akhir yang diperoleh menjadi lebih besar.

Selain itu, untuk meningkatkan kadar keberdayaan keluarga miskin dan sekaligus mencegah risiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari usaha keluarga miskin alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beraneka ragam atau satu dengan yang lain saling berbeda.

f. Program Penanganan yang Konsisten

Keinginan agar perkembangan suatu daerah atau wilayah makin sensitif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat miskin atau golongan marginal sebetulnya sudah tercantum dalam Renstra pembangunan pada masing-masing daerah atau wilayah. Tetapi, sering terjadi suatu daerah atau wilayah yang tumbuh karena dihela kekuatan industri dan semata hanya pro-modernitas, justru tumbuh tanpa perasaan, dan cenderung malah melakukan berbagai regulasi untuk membatasi ruang gerak masyarakat miskin. Seperti di Jakarta dan Surabaya, belakangan ini Pemerintah Kota tampaknya selalu mengembangkan sikap dan kebijakan yang sifatnya kontra terhadap kehadiran kaum migran dan masyarakat marginal kota yang berserakan di berbagai sudut kota. Dengan dalih bahwa kehadiran mereka menyebabkan kota menjadi semrawut dan kotor, maka ratusan personil diturunkan di tujuh jalur utama dengan tujuan menertibkan berbagai kelompok penyandang masalah sosial mulai dari Pekerja Seks Komersial, anak jalanan, pengamen, Pedagang Kaki Lima, tukang becak dan sebagainya.

Selama ini, ciri yang menandai perkembangan kota-kota di negara sedang berkembang biasanya adalah berbagai bentuk kontradiksi, yakni polarisasi dan distorsi. Sering terjadi, dengan dalih demi ketertiban kota dan agar investor bersedia menanamkan modalnya, hak-hak masyarakat miskin di kota kemudian diabaikan, dan

bahkan dengan berbagai alasan mereka seolah-olah diperlakukan seperti pendatang yang hanya menodai kebersihan dan kemajuan perkembangan kota itu sendiri. Penggusuran, operasi penertiban, dan sejenisnya adalah fenomena sehari-hari yang dengan mudah kita jumpai di kota-kota besar.

g. Pemberdayaan Kontrol dan Prakarsa Lokal

Untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan program pembangunan, maka perlu dikedepankan keterlibatan lembaga-lembaga lokal untuk ikut melakukan kontrol atas pelaksanaan program di daerahnya. Dalam hal ini, beberapa bentuk program taktis yang barangkali perlu dilaksanakan, adalah (1) pemasangan "papan reformasi" di tiap-tiap kelurahan sebagai media informasi alokasi dana dan rincian program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan, dan (2) pembentukan tim verifikasi di tiap-tiap kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM dan ulama yang bertugas untuk memberikan keputusan terakhir dalam penentuan kelompok sasaran program, sekaligus berperan sebagai kelompok kontrol dari pelaksanaan program di luar mekanisme kelembagaan yang sudah ada.

8. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan diperhadapkan dengan berbagai permasalahan pembangunan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana umum, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang tinggi, serta kemiskinan masyarakat. Permasalahan mendasar yang sering dijadikan dasar penilaian hasil pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan.

Namun gejala yang paling menonjol adalah rendahnya pendapatan masyarakat atau dapat diidentikkan dengan kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dapat mempengaruhi temperamen sosial budaya dan emosional masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku yang kurang rasional seperti cepat marah dan mudah untuk diprovokasi kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

Oleh karena permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, maka strategi penganggulangannya juga harus bersifat multidimensional pula. Selama ini yang

dilakukan oleh pemerintah hanyalah bersifat ekonomi semata-mata, sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Hal ini berarti menggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politis. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan lapisan masyarakat miskin (Tjokrowinoto, 1993) adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-politis. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin tersebut tinggal.
- b. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya biarkan kesadaran kritis orang miskin muncul dan bersamaan itu biarkan pula melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.
- c. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial. Nasib orang miskin bukannya tidak dapat dirubah, tetapi dapat dirubah dan yang mempunyai kekuatan untuk merubah adalah diri sendiri. Artinya Tuhan melahirkan setiap umatnya di dunia dalam keadaan yang sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi produk masyarakat itu sendiri (*the social construction*).
- d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Sebagai contoh adalah bagaimana merealisasikan Program Proyek Kawasan Terpadu (PKT) dengan perumus utama proyek itu adalah lapisan masyarakat miskin. Ini hanya dapat tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok dan *strategic persons*, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi politik mengalami distorsi, maka rumusan pembangunan hanya akan mencerminkan kepentingan bukan lapisan masyarakat miskin.

- e. Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktur yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya.
- f. Diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Meskipun keempat langkah di atas dapat dipenuhi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, masyarakat miskin tetap saja tidak memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses ke bidang-bidang lainnya. Dengan demikian butir-butir usulan itu seyogyanya dilakukan simultan dan terpadu.

Apabila langkah-langkah itu dapat dilaksanakan secara terpadu, maka kemiskinan akan dapat ditanggulangi, dan apabila kemiskinan dapat ditanggulangi maka ketimpangan akan surut pula. Langkah-langkah di atas merupakan gambaran bahwa antara deregulasi ekonomi dan deregulasi politik tidak dapat dipisahkan.

B. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan perubahan tidak hanya di harapkan terjadi pada aspek fisik dan kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil, tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh atau membangun berbagai pusat pembelanjaan. Namun juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu (Soetrisno, 1995).

Selama proses transformasi yang dijalankan pada tahun-tahun terakhir, pembangunan ekonomi di satu sisi memang telah menghasilkan pertumbuhan yang

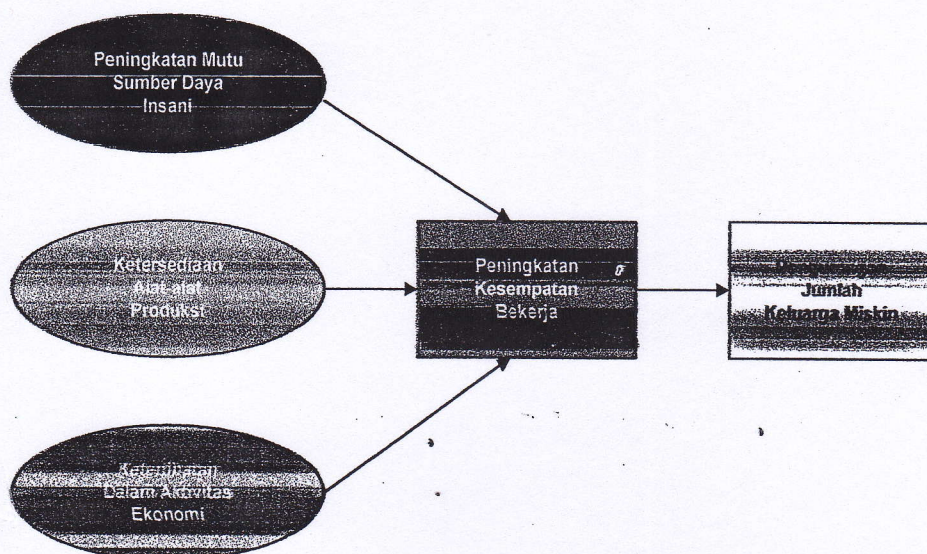
tinggi. Tetapi, harus diakui bahwa kemajuan di bidang ekonomi yang termasuk spektakuler itu ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat dan kesenjangan antar daerah. Di Kawasan Indonesia Timur termasuk Provinsi Sulawesi Selatan, ada sejumlah dilema yang harus dihadapi pemerintah dalam melaksanakan dan merencanakan program pembangunan. Sejumlah dilema pembangunan itu antara lain adalah : (1) dilema antar penduduk dan antar wilayah, (2) masalah pelayanan dasar, (3) pem-bangunan prasarana, (4) masalah kemiskinan, (5) masalah kualitas sumber daya manusia, dan (6) masalah industri dan perdagangan.

Secara teoretis, salah satu faktor yang menjadi penyebab berbagai program pembangunan kurang memberikan hasil yang maksimal adalah bersumber pada masalah manajemen pembangunan yang kurang berjalan dengan baik, terutama di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program. Menurut Robert Chambers (1987), kenyataan kemiskinan dan kesenjangan masih merebak di berbagai negara sedang berkembang adalah karena para perencana pembangunan seringkali hanya bertindak seperti "turis pembangunan" dan bertindak sebagai "orang luar" yang bersikap sok tahu, sehingga dalam banyak hal kurang empatif terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di wilayah. Di berbagai Negara, banyak bukti menunjukkan bahwa para perencana pembangunan cenderung dipenuhi dengan prasangka atau syakwasangka dan mereka terlalu percaya pada angka-angka statistik yang sesungguhnya kurang dapat dipercaya.

Persoalan yang dihadapi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sekarang adalah bagaimana dapat mengurangi jumlah keluarga miskin. Secara teori menunjukkan bahwa pengurangan jumlah keluarga miskin adalah diantaranya melalui peningkatan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, maka diperlukan peningkatan mutu sumberdaya insani, penyediaan alat-alat produksi yang memadai, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Pada gambar di bawah, variabel yang ditempatkan dalam kotak persegi adalah *measured variable*, yaitu variabel yang nilainya diperoleh dalam aktivitas penelitian. Variabel yang ditempatkan dalam sekat berbentuk oval adalah *latent variable (unobserved variable)*, variabel yang nilainya diperoleh melalui penelitian indikator dari variabel atau faktor dimaksud. Garis panah satu arah dalam gambar menunjukkan hipotesis yang dikembangkan antara dua variabel yang bersangkutan. Penggambaran

dalam SEM akan melahirkan model, dan model itu berguna untuk melaksanakan strategi yang dirumuskan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka dikemukakan beberapa konsep operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan adalah ketidakseimbangan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sedangkan basis kekuasaan sosial adalah terdiri dari (a) modal produktif atas asset, (b) sumber keuangan, (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan memadai, dan (e) informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.
2. Pengurangan jumlah keluarga miskin adalah berkurangnya keluarga yang miskin di Sulawesi Selatan, baik dalam artian mutlak atau pun relatif sebagai hasil dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dikoor-dinasikan oleh pemerintah provinsi. Pengurangan jumlah keluarga miskin diantaranya sangat dipengaruhi oleh peningkatan kesempatan kerja dari seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, terutama warga miskin dan tenaga kerja putus sekolah serta alumnus lembaga pendidikan, termasuk lulusan pendidikan tinggi.
3. Peningkatan kesempatan kerja adalah peningkatan peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi guna mendapatkan penghasilan tetap dari masyarakat yang

ada di wilayah Sulawesi Selatan. Peningkatan kesempatan kerja diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan mutu sumberdaya insani, ketersediaan alat produktif, dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi.

4. Peningkatan mutu sumberdaya insani diukur berdasarkan indikator dari *job training*, penyuluhan, pemagangan, pendampingan, dan diklat khusus.
5. Ketersediaan alat produksi diukur berdasarkan indikator dari jenis alat produksi yang digunakan, kapasitas alat produksi, modal kerja, kredit investasi, dan hibah dari perusahaan-perusahaan negara kepada kelompok-kelompok produktif dari keuntungan yang dicapai.
6. Keterlibatan dalam aktivitas ekonomi diukur berdasarkan indikator dari kejelasan bidang usaha yang dijalankan, kepastian pasar, dukungan bantuan disain produk, kepastian sumber bahan, kemudahan perizinan usaha, dan perpajakan.
7. Strategi pengentasan kemiskinan merupakan perumusan program jangka panjang disemua bidang terkait dalam usaha mengurangi secara signifikan atas jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Model pengentasan kemiskinan merupakan infrastruktur dari strategi usaha pengentasan kemiskinan, yaitu sebagai cara, metode, kiat dan patron yang harus diaplikasikan agar program pengentasan kemiskinan tercapai

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : (1) Bone, (2) Gowa, (3) Tana Toraja, (4) Jeneponto, (5) Makassar, (6) Parepare, (7) Soppeng, (8) Bantaeng, (9) Barru, dan (10) Sidrap. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6(enam) bulan, yaitu Juni 2005 sampai dengan Oktober 2006.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat atau rumah tangga yang dikategorikan miskin yang ada di 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Lima kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, dan lima kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk miskin terendah. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini, maka sampel akan ditarik secara *Stratified Random sampling*. Pada setiap kabupaten/kota dipilih 2 kecamatan, dan pada setiap kecamatan dipilih lagi 2 desa/kelurahan. Akhirnya pada setiap desa/kelurahan dipilih secara *random* 20 rumah tangga yang dikategorikan penduduk miskin. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 800 rumah tangga yang berasal dari 40 desa/kelurahan.

Untuk lebih jelasnya sampel dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Responden untuk Setiap Desa/Kelurahan

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah (Orang)	%
1	Tana Toraja	Makale	Sarira	20	2,50
			Tiromanda	20	2,50
		Rantepao	Pasele	20	2,50
			Singki	20	2,50
2	Sidrap	Maritengngae	Lakessi	20	2,50
			Sreang	20	2,50
		Watang Pulu	Arawa	20	2,50
			Lawawoi	20	2,50
3	Barru	Soppeng	Ajakkang	20	2,50
		Riaja	Keru-Keru	20	2,50

		Balusu	Balusu Lampoko	20 20	2,50 2,50
4	Soppeng	Liliriaja	Barang	20	2,50
			Jennae	20	2,50
		Manoriwawo	Congko	20	2,50
			Labessi	20	2,50
5	Makassar	Biringkanaya	Paccerakkang	20	2,50
			Untia	20	2,50
		Tallo	Rappojawa	20	2,50
			Rappokalling	20	2,50
6	Bone	T.R. Timur	Toro	20	2,50
			Lonrae	20	2,50
		T.R. Barat	Macegae	20	2,50
			Jeppe'E	20	2,50
7	Jeneponto	Binamu	Bontoa	20	2,50
			Balang Beru	20	2,50
		Tamalatea	Manjangloe	20	2,50
			Karelayu	20	2,50
8	Bantaeng	Pa'jukukkang	Lumpangan	20	2,50
			Biangkeke	20	2,50
		Bissappu	Bonto Salluang	20	2,50
			Bonto Rita	20	2,50
9	Pare-Pare	Soreang	Watang Soreang	20	2,50
			Ujung Baru	20	2,50
		Bacukiki	Kampung Baru	20	2,50
			Lompoe	20	2,50
10	Gowa	Bajeng	Pacciro	20	2,50
			Bajeng	20	2,50
		Bontonompo	Bonto Biraeng	20	2,50
			Selatan	20	2,50
			Bonto Biraeng		
			Utara		
Jumlah				800	100,00

C. Indikator/Parameter Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 variabel, yaitu terdiri dari 3 variabel Independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel antara. Variabel Independen terdiri dari Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI), Ketersediaan Alat Produksi (KAP), dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE). Variabel Dependen adalah Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK), dan variable antara adalah Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB).

Tabel 4. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian
Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JBT = Job Training ➤ PYL = Penyuluhan ➤ PMG = Pemagangan ➤ PDP = Pendampingan ➤ DKS = Diklat Khusus
Ketersediaan Alat Produksi (KAP)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JAP = Jenis Alat Produksi ➤ KTP = Kapasitas Alat Produksi ➤ MDK = Modal Kerja ➤ KRI = Kredit Investasi ➤ HBH = Hibah
Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KBU = Kejelasan Bidang Usaha yang Dijalankan ➤ KPP = Kepastian Pasar ➤ DDP = Dukungan Bantuan Disain Produk ➤ KSB = Kepastian Sumber Bahan ➤ KPU = Kemudahan Perizinan Usaha ➤ PJK = Perpajakan
Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JKK = Jumlah kalori dikonsumsi ➤ PMK = Pendapatan Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga ➤ ALS = Anak yang Lanjut Studi ➤ PRP = Perubahan Pendapatan ➤ PRK = Perawatan Kesehatan ➤ MIA = Menjalankan Ibadah Sesuai Ajaran Agama
Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KTM = Keterampilan sesuai bidang usaha yang dimiliki ➤ PBM = Pengalaman Bekerja Mandiri di Sektor Formal dan Informal ➤ PBB = Pengalaman Bekerja Sebagai Buruh ➤ KMB = Keterampilan untuk Memanfaatkan Barang Bekas

D. Model Analisis

Model Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling (SEM)* dengan *Software Amos Versi 4.1*, yaitu model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel Peningkatan Mutu Sumber Daya Insani (MSDI), Ketersediaan Alat Produktif (KAP), dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) terhadap Variabel Peningkatan Kesempatan Kerja (PKK), dan sekaligus melakukan analisis pengaruh Peningkatan Kesempatan Kerja (PKK) terhadap Pengurangan Jumlah Keluarga Miskin (PKM).

Tabel 5. Tahapan-Tahapan dalam Analisis Model Persamaan Struktural

Langkah/ Tahapan	Kegiatan
1	Pengembangan sebuah model berbasis teori
2	Menyusun <i>path diagram</i> untuk menyatakan hubungan kausalitas
3	Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran
4	Memilih matrik input dan model/teknik estimasi
5	Menilai <i>problem identification</i>
6	Evaluasi <i>goodness of Fit</i>
7	Interpretasi dan modifikasi model

Model analisis ini memiliki keistimewaan dibanding dengan metode analisis lainnya, karena merupakan gabungan dari model regresi dan analisis jalur. Alasan digunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* dalam penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa (1) SEM memberikan metode langsung berkaitan dengan hubungan ganda secara simultan sekaligus memberikan efisiensi analisis statistika, dan (2) Kemampuannya untuk menguji hubungan secara komprehensif dan memberikan suatu bentuk transisi analisis *exploratory* menuju analisis *confirmatory*. Bentuk transisi ini berkaitan dengan upaya yang lebih besar dalam semua lapangan studi untuk mengembangkan suatu pandangan masalah secara lebih sistematis dan holistik. Upaya seperti itu memerlukan kemampuan untuk menguji suatu hubungan yang berantai yang membentuk model yang besar, seperangkat prinsip dasar, atau suatu teori keseluruhan.

- a. β = Koefisien jalur yang menjelaskan pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen.
- b. η = Koefisien jalur yang menjelaskan pengaruh dari variabel independen ke variabel independen lainnya.
- c. ζ (zeta) = *Error term*

Tabel 6. Good of Fit Index untuk Evaluasi Model

Chi-square	Menguji apakah <i>covariance</i> populasi yang diestimasi sama dengan <i>covariance</i> sampel (apakah model sesuai dengan data). Bersifat sangat sensitive untuk sampel besar (di atas 200)	Diharapkan Kecil
Probabilty	Uji signifikansi terhadap perbedaan matriks <i>covariance</i> data dan matriks <i>covariance</i> yang diestimasi	$\geq 0,05$
RMSEA	Mengkompensasi kelemahan <i>Chi-Square</i> pada sample besar	$\leq 0,08$
GFI	Menghitung proporsi tertimbang varians dalam matriks sampel yang dijelaskan oleh matriks <i>covariance</i> populasi yang diestimasi (analog dengan R^2 dalam regresi berganda)	$\geq 0,90$
AGFI	GFI yang disesuaikan terhadap DF	$\geq 0,90$
CMIND/DF	Kesesuaian antara data dan model.	$\leq 2,00$
TLI	Pembandingan antara model yang diuji terhadap <i>base line</i> model	$\geq 0,95$
CFI	Uji kelayakan model yang tidak sensitive terhadap besarnya sample dan kerumitan model	$\geq 0,94$

Sumber: Ferdinand, A. (2002)

Ada beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak. Untuk lebih jelasnya indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model adalah seperti dalam Tabel 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan daerah yang kaya akan hasil pertanian dan agroindustri. Bahkan, ketika Indonesia terpuruk akibat krisis ekonomi dan moneter, petani tanaman ekspor dan pengusaha agroindustri Sulawesi Selatan justru mendapat berkah. Penghasilan mereka meningkat tajam berkat kenaikan harga ekspor hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. Penjualan hasil panen mereka semuanya dibayar dengan konversi terhadap dollar Amerika yang mengalami apresiasi tinggi.

Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar terletak antara $0^{\circ}12'-8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup areal seluas $62.482,54 \text{ km}^2$. Menurut tata guna lahan, pada 2004 wilayah itu meliputi areal hutan seluas 28.792 km^2 atau 46,1%, belukar seluas 10.766 km^2 atau 17,2%, Padang rumput seluas 4.946 km^2 atau 7,9%, ladang seluas 4.339 km^2 atau 6,9%, persawahan seluas 5.050 km^2 atau 8,1%, perkebunan seluas 2.889 km^2 atau 4,6%, perairan darat 1.523 km^2 atau 2,4%, dataran tandus seluas 139 km^2 atau 0,2 %, permukiman seluas 1.462 km^2 atau 2,3%, dan areal lainnya seluas 514 km^2 atau 0,7% dari seluruh luas wilayah Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 20 wilayah berstatus kabupaten dan 3 wilayah kota. Wilayah kota meliputi Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, pada tahun 2004 terdapat 249 wilayah kecamatan, 8.822 desa dan kelurahan, 10.336 dusun dan RW, serta sebanyak 34.166 RT. Untuk lebih jelasnya jumlah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/RW, dan RT di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW, Dan RT Setiap Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2004

No	Kab./Kota	Kecamatan	Desa/Kel	Dusun/RW	RT
01	Luwu	13	192	744	1.601
02	Tana Toraja	15	293	1.001	2.007
03	Pinrang	12	104	277	940
04	Enrekang	9	111	378	1.077
05	Sidrap	11	105	255	1.052
06	Wajo	14	176	403	1.964
07	Soppeng	7	70	155	433
08	Barru	7	54	220	669
09	Pangkep	12	100	379	1.349
10	Bone	27	372	1.096	3.451
11	Maros	14	103	388	1.410
12	Gowa	16	154	742	2.935
13	Sinjai	9	75	297	1.294
14	Bulukumba	10	125	531	1.865
15	Bantaeng	6	67	160	1.166
16	Jeneponto	10	112	470	989
17	Takalar	7	73	321	1.381
18	Selayar	10	73	295	640
19	Makassar	14	143	932	4.536
20	Pare-Pare	3	21	139	379
21	Luwu Utara	11	172	651	1.419
22	Palopo	4	28	106	545
23	Luwu Timur	8	99	396	1.064
Jumlah		249	8.822	10.336	34.166

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Daerah Sulawesi Selatan merupakan wilayah semenanjung yang berbukit-bukit, terbentang dari ujung utara hingga ujung selatan, dengan ketinggian antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Di antara bentangan itu, terhampar pula dataran rendah yang sangat potensial untuk pertanian dan pertambakan atau perikanan.

Daerah ini memiliki empat buah danau dan beberapa sungai besar, serta beberapa waduk dan perairan umum yang luas, sekaligus mengelilingi sebagian besar daerah yang dijuluki angin mamiri ini. Selain itu, daerah ini juga memiliki sejumlah pulau besar dan kecil yang mengitari wilayah Sulsel ini.

Iklim di Sulawesi selatan termasuk iklim tropis basah dan sangat dipengaruhi oleh angin musim Barat dan musim Timur, sehingga curah hujannya cukup tinggi dan merata di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Dimusim barat (antara Oktober-April), pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi, sedang dimusim timur pada periode itu sedang musim kemarau. Sebaliknya, antara

April-Oktober pesisir Timur mendapat curah hujan yang tinggi, sedang di pesisir Barat sedang musim kemarau. Dengan iklim demikian, maka di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kesempatan mengatur gilir tanam antara padi-sawah dan palawija. Suhu udara di daerah ini berkisar antara 24° - 33° Celsius.

Provinsi Sulsel tergolong daerah yang lazim terancam berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, angin puyuh, kekeringan, dan kebakaran hutan. Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakatnya selain sudah maju, juga dikenal punya wawasan dan pendirian yang kuat dalam menyikapi berbagai perkembangan politik, ekonomi, hukum, dan hankam di tanah air selama ini. Selain sudah maju, Sulawesi Selatan juga dikenal kaya akan sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan dan perikanan laut. Daerah ini termasuk salah satu lumbung pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi daerah, yang akan dimulai 1 Januari 2001 dan sudah efektif diberlakukan serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dinantikan dengan penuh antusias. Otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah sangat menggembirakan daerah kaya; seperti Riau, Kalimantan Timur, Papua, termasuk Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan laut. Era otonomi daerah akan membuka peluang untuk memanfaatkan potensi alam yang ada untuk membangun daerah Sulawesi Selatan. Tetapi, hal itu harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, termasuk birokrat dan kepala pemerintahan, serta pihak swasta sebagai mitra kerja.

Tabel 8. Jumlah Kepala Keluarga Pada Setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2003 – 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Perkembangan (%)
01	Luwu	62.220	64.445	3,58
02	Tana Toraja	88.627	90.100	1,66
03	Pinrang	76.279	79.007	3,58
04	Enrekang	38.139	38.334	0,51
05	Sidrap	59.259	60.226	1,63
06	Wajo	88.124	89.278	1,31
07	Soppeng	59.725	60.588	1,44
08	Barru	42.221	43.112	2,11
09	Pangkep	63.168	64.008	1,33
10	Bone	161.464	162.489	0,63

11	Maros	63.639	64.725	1,71
12	Gowa	132.499	136.101	2,65
13	Sinjai	49.730	50.607	1,76
14	Bulukumba	93.807	95.339	1,63
15	Bantaeng	40.305	40.951	1,60
16	Jeneponto	75.056	78.344	4,38
17	Takalar	62.109	63.191	1,74
18	Selayar	30.512	34.439	12,87
19	Makassar	213.843	220.314	3,03
20	Pare-Pare	25.041	26.404	5,44
21	Luwu Utara	60.760	61.601	1,38
22	Palopo	23.884	23.833	(0,21)
23	Luwu Timur	42.938	44.697	4,10
Jumlah		1.653.349	1.692.042	2,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 berjumlah 8.213.864 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 1.145.406 jiwa mendiami Kota Makassar.

Jumlah kepala keluarga pada tahun 2003 sebanyak 1.653.349 keluarga dan pada tahun 2004 sebanyak 1.692.042 keluarga, atau pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 2,34% terhadap tahun 2003. Untuk lebih jelasnya jumlah kepala keluarga di Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 9. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Setiap Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2004

No	Kabupaten/ Kota	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
01	Luwu	56.259	8.186	64.445
02	Tana Toraja	77.405	12.695	90.100
03	Pinrang	66.130	12.877	79.007
04	Enrekang	32.167	6.167	38.334
05	Sidrap	51.113	9.113	60.226
06	Wajo	74.361	14.917	89.278
07	Soppeng	50.865	9.734	60.588
08	Barru	36.307	6.805	43.112
09	Pangkep	54.335	9.673	64.008
10	Bone	136.973	25.516	162.489
11	Maros	56.714	8.011	64.725
12	Gowa	122.462	13.548	136.101
13	Sinjai	44.689	5.918	50.607
14	Bulukumba	81.059	14.280	95.339
15	Bantaeng	35.691	5.260	40.951
16	Jeneponto	69.709	8.635	78.344

17	Takalar	53.626	9.565	63.191
18	Selayar	27.125	7.314	34.439
19	Makassar	196.881	23.433	220.314
20	Pare-Pare	22.558	3.846	26.404
21	Luwu Utara	55.188	6.413	61.601
22	Palopo	20.490	3.343	23.833
23	Luwu Timar	41.225	3.427	44.697
Jumlah		1.463.321	228.721	1.692.042

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki jumlah kepala keluarga yang terbesar dibanding dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan 3,03%. Namun demikian, jika ditinjau dari tingkat pertumbuhannya pada tahun 2004, maka jumlah kepala keluarga di Kabupaten Selayar mengalami pertumbuhan yang tertinggi, yaitu sebesar 12,87%.

Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa menurut jenis kelamin, kepala keluarga Laki-Laki pada setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan jumlahnya lebih besar dibanding dengan jumlah kepala keluarga perempuan. Pada tahun 2004 jumlah kepala keluarga laki-laki sebesar 1.463.321 keluarga (86,48%) dan jumlah kepala keluarga perempuan hanya sebesar 228.721 kepala keluarga (13,52%). Angka-angka itu menjelaskan, bahwa cukup banyak perempuan yang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Itu disebabkan oleh berbagai hal, seperti : (a) janda, ditinggal mati atau cerai oleh suaminya, (b) ditinggal oleh suami yang sedang merantau mengadu nasib, (c) di rumah tangga itu, hanya yang bersangkutan yang memiliki pendapatan, dan (d) karena keterpaksaan.

Dari 1,692,042 rumah tangga seperti pada Tabel 10, sekitar 84,12% merupakan rumah tangga yang utuh, artinya masih terdiri atas suami dan istri dan anak-anak serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Namun demikian, terdapat 268,776 rumah tangga atau 15,82% yang kepala rumah tangganya adalah duda atau janda, dan atau masih lajang.

Pada umumnya, keluarga yang kepala rumah tangganya adalah janda, atau yatim-piatu yang masih lajang, berpotensi sebagai rumah tangga yang berkekurangan atau cenderung miskin. Anak-anak atau anggota keluarga usia sekolah, kadang-kadang sulit untuk melanjutkan studinya sebagai akibat dari kesulitan biaya. Namun demikian, potensi keluarga miskin akan lebih tergambar pada jenis penghasilan mereka dan akan

diuraikan pada bahasan yang lain. Selanjutnya, disajikan data lengkap kepala keluarga menurut status perkawinan dalam Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan Setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2004

No	Kabupaten/ Kota	Kawin	Duda/Janda/ Belum Kawin	Jumlah
01	Luwu	54.383	10.062	64.445
02	Tana Toraja	74.653	15.447	90.100
03	Pinrang	64.296	14.711	79.007
04	Enrekang	30.710	7.624	38.334
05	Sidrap	49.437	10.789	60.226
06	Wajo	72.317	16.961	89.278
07	Soppeng	49.535	11.053	60.588
08	Barru	35.280	7.832	43.112
09	Pangkep	53.632	10.376	64.008
10	Bone	133.505	28.984	162.489
11	Maros	55.330	9.395	64.725
12	Gowa	119.717	16.293	136.101
13	Sinjai	43.340	7.267	50.607
14	Bulukumba	79.691	15.648	95.339
15	Bantaeng	34.750	6.201	40.951
16	Jeneponto	67.457	10.887	78.344
17	Takalar	51.739	11.452	63.191
18	Selayar	25.056	9.383	34.439
19	Makassar	192.425	27.889	220.314
20	Pare-Pare	21.776	4.628	26.404
21	Luwu Utara	53.970	7.631	61.601
22	Palopo	20.231	3.602	23.833
23	Luwu Timur	40.036	4.661	44.697
Jumlah		1.423.266	268.776	1.692.042

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Tabel 11 disajikan data pendidikan kepala keluarga rumah tangga miskin. Dari sisi pendidikan, kepala keluarga berpendidikan SD atau buta huruf sekitar 33,25% dan yang berpendidikan SLTP sekitar 41.20%, dan sisanya berpendidikan SLTA keatas sekitar 25.55%. Tingkat pendidikan kepala keluarga mencerminkan, bahwa sekitar 75% berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) dan hanya sekitar 25% yang berpendidikan lebih tinggi (SLTA sampai perguruan tinggi). Hal itu sekaligus menjelaskan, potensi kepala rumah tangga untuk mengadopsi informasi baru guna memperbaiki kesejahteraan keluarga, juga rendah. Dengan demikian, dalam usaha meningkatkan kapasitas akses mereka terhadap informasi peningkatan kesejahteraan keluarga, kepala

keluarga yang ada perlu diikuti program pelatihan dan penyuluhan. Metode dan isi pelatihan dan penyuluhan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka.

Tabel 11. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan Setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2004

No	Kabupaten/ Kota	Tidak Tamat SD	Tamat SD— SLTP	Tamat SLTA Keatas	Jumlah
01	Luwu	17.066	32.344	15.035	64.445
02	Tana	32.769	33.317	24.014	90.100
03	Toraja	25.554	36.856	16.597	79.007
04	Pinrang	11.189	16.581	10.564	38.334
05	Enrekang	20.108	27.882	12.236	60.226
06	Sidrap	34.919	42.301	12.058	89.278
07	Wajo	20.806	25.590	14.192	60.588
08	Soppeng	15.358	19.087	8.667	43.112
09	Barru	23.538	28.201	12.269	64.008
10	Pangkep	60.946	72.790	28.753	162.489
11	Bone	24.979	24.733	15.013	64.725
12	Maros	56.367	48.409	31.234	136.101
13	Gowa	19.889	20.474	10.244	50.607
14	Sinjai	37.234	37.207	20.898	95.339
15	Bulukumba	21.234	13.096	6.612	40.951
16	Bantaeng	39.777	26.404	12.163	78.344
17	Jeneponto	26.164	24.861	12.166	63.191
18	Takalar	12.748	15.219	6.472	34.439
19	Selayar	27.265	76.428	116.621	220.314
20	Makassar	4.249	10.057	12.098	26.404
21	Pare-Pare	17.372	32.331	11.898	61.601
22	Luwu	4.053	9.156	10.624	23.833
23	Utara	9.758	23.716	11.223	44.697
	Palopo				
	Luwu				
	Timur				
Jumlah		563.351	697.040	431.651	1.692.042

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Rendahnya tingkat pendidikan dimaksud menyebabkan kepala rumah tangga miskin sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja di sektor formal. Disamping itu, mereka juga sulit untuk menyerap informasi baru, terutama yang berkaitan dengan dunia kerja yang potensial.

B. Gambaran Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa garis kemiskinan secara nasional memakai beberapa macam pendekatan. Pada awal 1970-an, Sayogyo

menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita per tahun sebagai indikator kemiskinan. Sayogyo dalam Ade Cahyat (2004) mengemukakan indikator ekuivalen beras seperti tersebut dalam Tabel 12 di bawah.

Tabel 12. Indikator Kemiskinan Ekuivalen Konsumsi Beras

Kriteria	Pedesaan (kg/org/tahun)	Perkotaan (kg/org/tahun)
1. Melarat	180	270
2. Sangat miskin	240	360
3. Miskin	320	480

Sumber : Sayogyo dalam Ade Cahyat (2004)

Menurut BKKBN, terdapat lima tahapan atau kategori keluarga sejahtera, yaitu :

1. Keluarga pra sejahtera (sangat miskin).
2. Keluarga sejahtera I (miskin)
3. Keluarga sejahtera II
4. Keluarga sejahtera III
5. Keluarga sejahtera III plus

Pendekatan pengukuran tingkat kesejahteraan oleh BKKBN adalah pada keluarga, sedang BPS adalah Rumah Tangga. Indikator setiap tahapan dibedakan atas alasan ekonomi dan alasan non-ekonomi. Adapun indikator dimaksud disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut Tahapannya

Tahapan	Indikator Ekonomi	Indikator Non-ekonomi
Pra Sejahtera (sangat miskin)	Makan dua kali atau lebih sehari	Melaksanakan ibadah
Belum dpt memenuhi salah satu atau lebih dari indikator , meliputi :	Memakai pakaian yang berbeda utk aktivitas (di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian)	Bila anak sakit, anak itu dibawa ke sarana perawatan kesehatan
Sejahtera I (Miskin) Karena alasan ekonomi tdk dapat memenuhi salah satu atau lebih dari indikator, meliputi:	Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru Luas lantai rumah paling kurang 8 m ² untuk setiap	Ibadah teratur Sehat dalam 3 bln terakhir Punya penghasilan tetap Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin Usia 6-15 tahun bersekolah Anak lebih dari 2 orang

	penghuni	Peserta KB
Sejahtera II Karena alasan ekonomi tdk dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari :	Memiliki tabungan keluarga Makan bersama sambil berkomunikasi Mengikuti kegiatan masyarakat Rekreasi bersama (sekali 6 bulan) Meningkatkan pengetahuan agama Memperoleh berita dari srt kabar, radio, TV & majalah Menggunakan sarana transportasi	
Sejahtera III Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:	Memiliki tabungan keluarga Makan bersama sambil berkomunikasi. Mengikuti kegiatan masyarakat Rekreasi bersama (sekali 6 bulan) Meningkatkan pengetahuan agama Memperoleh berita dari srt kabar, radio, TV & majalah Menggunakan sarana transportasi	
Sejahtera III Plus Sudah dpt memenuhi beberapa indikator	Aktif memberikan sumbangan material secara teratur Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan	

Sumber : Diolah dari Ade Cahyat (2004)

a. Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi

Tabel 14. Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi Pada Setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Jiwa	%
01	Luwu	8.466	9.203	737	8.71
02	Tana Toraja	13.254	13.699	445	3.36
03	Pinrang	6.187	6.622	435	7.03

04	Enrekang	4.729	4.655	(74)	(1.56)
05	Sidrap	3.695	3.567	(128)	(3.46)
06	Wajo	1.939	2.262	323	16.66
07	Soppeng	205	253	48	23.41
08	Barru	1.644	1.566	(78)	(4.74)
09	Pangkep	1.321	1.247	(74)	(5.60)
10	Bone	6.906	6.629	(277)	(4.01)
11	Maros	4.278	5.588	1.310	30.62
12	Gowa	22.239	22.197	(42)	(0.19)
13	Sinjai	2.782	2.972	190	6.83
14	Bulukumba	11.579	12.662	1.083	9.35
15	Bantaeng	7.122	8.430	1.308	18.37
16	Jeneponto	17.229	18.184	955	5.54
17	Takalar	6.399	6.047	(352)	(5.50)
18	Selayar	2.318	2.371	53	2.29
19	Makassar	25.501	25.962	461	1.81
20	Pare-Pare	297	530	233	78.45
21	Luwu Utara	5.739	6.329	590	10.28
22	Palopo	2.025	2.492	467	23.06
23	Luwu Timur	5.586	6.801	1.215	21.75
Jumlah		161.440	170.268	8.828	5.47

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

Secara relatif, kabupaten/kota yang memiliki peningkatan tertinggi penduduk pra sejahtera dengan alasan ekonomi ialah Kota Parepare dengan peningkatan 78.5% (233 keluarga), kemudian Kabupaten Maros 30.62% (1.310 keluarga), Kabupaten Soppeng 23.41% (48 keluarga) dan Kota Palopo 23.06% (467 keluarga). Namun demikian, secara mutlak peningkatan keluarga pra sejahtera dengan alasan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 8,828 keluarga atau 5.47%. Dihubungkan dengan kriteria dalam Tabel 12, dengan memperhatikan data hasil penelitian, keluarga ini sudah mampu memenuhi kon-sumsi dasar dengan makan 2 kali sehari, satu sampai dua piring beserta sepotong ikan atau tempe dan sayur. Tetapi gizi mereka masih dibawah 2,100 kalori per hari. Untuk kawasan pedesaan, rata-rata mencapai 1.900 kalori sedang di perkotaan hanya sekitar 1.600 kalori.

b. Keluarga Pra Sejahtera Bukan Alasan Ekonomi

Tabel 15. Keluarga Pra Sejahtera bukan Alasan Ekonomi Pada Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Keluarga	%
01	Luwu	2.858	2.675	(183)	(6.40)
02	Tana	4.570	4.466	(104)	(2.28)
03	Toraja	1.124	1.431	307	23.31

04	Pinrang	513	213	(300)	(58.48)
05	Enrekang	915	953	38	4.15
06	Sidrap	1.777	1.690	(87)	(4.90)
07	Wajo	191	184	(7)	(3.66)
08	Soppeng	3	0	(3)	(100)
09	Barru	291	336	45	15.46
10	Pangkep	3.225	2.952	(273)	(8.47)
11	Bone	363	184	(179)	(49.31)
12	Maros	6.368	7.064	696	10.93
13	Gowa	1.527	1.686	159	10.41
14	Sinjai	5.477	3.858	(1.619)	(29.56)
15	Bulukumba	2.146	2.009	(137)	(6.38)
16	Bantaeng	5.111	5.524	413	8.08
17	Jeneponto	723	587	(136)	(18.81)
18	Takalar	1.343	967	(376)	(28.00)
19	Selayar	3.100	3.403	303	9.77
20	Makassar	62	100	38	61.29
21	Pare-Pare	4.413	5.327	914	20.71
22	Luwu	201	285	84	41.79
23	Utara	3.198	2.357	(841)	(26.30)
	Palopo				
	Luwu				
	Timur				
Jumlah		62.487	48.251	(14.236)	(22.78)

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

Memperhatikan Tabel 15 di atas, maka di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat penurunan jumlah keluarga para sejahtera bukan alasan ekonomi sebanyak 14.236 keluarga (22.78%). Angka penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Bulukumba, yaitu 1.619 keluarga (29,56%), Luwu Timur 841 keluarga (26.30%), Kabupaten Selayar 376 keluarga (28%). Peningkatan terjadi di beberapa kabupaten/kota, yaitu Luwu Utara 914 keluarga (20.71%), Gowa 696 keluarga (10.63%) dan Jeneponto 413 keluarga (8.08%). Penurunan angka-angka ini antara lain dipicu oleh adanya pemantapan pelaksanaan wajib belajar, sehingga anak-anak usia sekolah sudah dapat bersekolah. Disamping itu, di beberapa kabupaten digalakkan pemberantasan buta aksara Al Quran, pembanyakan dan pemantapan TPA, dan pemberlakuan secara terbatas atas syariat Islam (khususnya di Bulukumba dan Bantaeng).

c. Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi

Tabel 16. Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi Pada Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Keluarga	%
01	Luwu	12.002	12.868	866	7.22
02	Tana Toraja	17.129	18.236	1.107	6.46
03	Pinrang	7.428	8.961	1.533	20.64
04	Enrekang	7.377	7.309	(68)	(0.92)
05	Sidrap	6.849	6.806	(43)	(0.63)
06	Wajo	8.887	9.176	289	3.25
07	Soppeng	4.709	4.811	102	2.17
08	Barru	11.022	10.678	(344)	(3.12)
09	Pangkep	9.446	9.898	452	4.79
10	Bone	23.250	21.927	(1.323)	(5.69)
11	Maros	10.709	12.837	2.128	19.87
12	Gowa	24.150	25.571	1.421	5.88
13	Sinjai	5.102	5.677	575	11.27
14	Bulukumba	13.696	13.898	202	1.47
15	Bantaeng	7.193	8.492	1.299	18.06
16	Jeneponto	17.305	17.225	(80)	(0.46)
17	Takalar	8.829	10.080	1.251	14.17
18	Selayar	4.278	4.581	303	7.08
19	Makassar	38.785	39.914	1.129	2.91
20	Pare-Pare	4.954	4.869	(85)	(1.72)
21	Luwu Utara	7.521	8.268	747	9.93
22	Palopo	4.149	4.282	133	3.21
23	Luwu Timur	5.339	6.137	798	14.95
Jumlah		260.109	272.501	12.392	4.76

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

Usaha pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat telah meningkatkan jumlah Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi sebanyak 12,392 keluarga (4,76%). Peningkatan tertinggi dicapai di Kabupaten Maros (19.87%), Kabupaten Bantaeng (18.06%), Kabupaten Luwu Timur (14.95%), Kabupaten Takalar (14.17%), dan Sinjai (11.27%). Lainnya kurang daripada 10%. Berdasarkan kriteria dalam Tabel 12 berarti keluarga ini sudah memiliki pola konsumsi yang lebih baik, dan perbaikan kualitas sandang mereka. Namun demikian, dalam kenyataannya, pemenuhan kebutuhan sandang ini sebagian dipenuhi melalui pembelian pakaian bekas (di daerah ini disebut sebagai pakaian cakar).

d. Keluarga Sejahtera I bukan Alasan Ekonomi

Secara keseluruhan, keluarga Sejahtera I dengan alasan non-ekonomi mengalami penurunan sebesar 42.715 keluarga atau 11.19%. Penurunan itu antara lain disebabkan oleh dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM pada tahap pertama berakibat naiknya angka inflasi dan harga bahan kebutuhan pokok. Akibatnya, kesempatan keluarga untuk menyekolahkan anak-anaknya menjadi terbatas. Tabel 17 menunjukkan, hanya 50% dari kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan keluarga Sejahtera I di daerahnya dan 50% lainnya justru mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Maros (2.421 keluarga atau sekitar 19.58%), Kabupaten Bantaeng (2.033 keluarga atau sekitar 20.36%), dan Kabupaten Luwu Utara (1.605 keluarga atau sekitar 12.16%).

Tabel 17. Keluarga Sejahtera I bukan Alasan Ekonomi Pada Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten /Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Keluarga	%
01	Luwu	12.022	12.958	936	7.79
02	Tana Toraja	19.906	19.244	(662)	(3.33)
03	Pinrang	9.445	9.214	(231)	(2.45)
04	Enrekang	3.741	3.290	(451)	(12.06)
05	Sidrap	11.957	12.214	257	2.15
06	Wajo	22.330	22.307	(23)	(0.10)
07	Soppeng	9.341	9.294	(47)	(0.50)
08	Barro	4.956	4.982	26	0.52
09	Pangkep	20.685	21.206	521	2.52
10	Bone	43.058	43.589	531	1.23
11	Maros	12.365	9.944	(2.421)	(19.58)
12	Gowa	30.891	31.069	178	0.58
13	Sinjai	14.279	13.444	(835)	(5.85)
14	Bulukumba	17.938	17.188	(750)	(4.18)
15	Bantaeng	9.987	7.954	(2.033)	(20.36)
16	Jeneponto	16.861	17.549	688	4.08
17	Takalar	9.863	9.161	(702)	(7.12)
18	Selayar	5.727	6.401	674	11.77
19	Makassar	33.802	34.549	747	2.21
20	Pare-Pare	6.000	6.772	772	12.87
21	Luwu Utara	13.198	11.593	(1.605)	(12.16)
22	Palopo	5.812	5.424	(388)	(6.68)
23	Luwu Timur	9.733	9.274	(459)	(4.72)
Jumlah		381.635	338.920	(42.715)	(11.19)

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

e. Keluarga Sejahtera II

Secara keseluruhan, jumlah keluarga Sejahtera II di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 3.52% atau 17.102 keluarga. Namun demikian, di beberapa kabupaten terjadi penurunan, yaitu Kabupaten Maros 1.85%, Bantaeng 1.43%, Selayar 14.08% dan Kota Palopo 2.07%. Penurunan jumlah keluarga Sejahtera II ini terutama terkait dengan kesulitan biaya hidup akibat kenaikan inflasi, harga BBM, dan harga kebutuhan pokok, sehingga mereka yang biasa menabung, terpaksa tidak mampu lagi menabung. Apalagi mereka yang bekerja sebagai buruh-tani, dimana pada tahun 2004 di beberapa daerah di Sulawesi Selatan hasil panen menurun akibat terlambatnya turun hujan.

Data lengkap mengenai jumlah keluarga Sejahtera II di Provinsi Sulawesi Selatan serta perubahannya untuk tahun 2003 dan 2004 disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18. Keluarga Sejahtera II Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Keluarga	%
01	Luwu	15.845	15.912	67	0.42
02	Tana Toraja	25.969	26.248	279	1.07
03	Pinrang	26.066	26.415	349	1.34
04	Enrekang	14.114	14.729	615	4.36
05	Sidrap	19.542	19.650	108	0.55
06	Wajo	31.268	32.257	989	3.16
07	Soppeng	22.559	23.680	1.121	4.97
08	Barro	17.205	18.386	1.181	6.86
09	Pangkep	15.753	15.807	54	0.34
10	Bone	46.160	48.160	2.000	4.33
11	Maros	19.682	19.318	(364)	(1.85)
12	Gowa	29.899	30.834	935	3.13
13	Sinjai	13.520	14.451	931	6.89
14	Bulukumba	31.788	33.817	2.029	6.38
15	Bantaeng	11.179	11.019	(160)	(1.43)
16	Jeneponto	15.637	16.773	1.136	7.26
17	Takalar	22.729	23.978	1.249	5.50
18	Selayar	7.052	6.059	(993)	(14.08)
19	Makassar	57.143	60.110	2.967	5.19
20	Pare-Pare	4.142	4.266	124	2.99
21	Luwu Utara	20.616	22.173	1.557	7.55
22	Palopo	6.387	6.255	(132)	(2.07)
23	Luwu Timur	11.495	12.555	1.060	9.22
Jumlah		485.750	502.852	17.102	3.52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

Ada beberapa faktor tidak terduga yang menyebabkan terjadinya perubahan angka-angka keluarga Sejahtera II ini. Faktor berpengaruh yang tidak terduga dimaksud adalah dampak dari kenaikan harga BBM yang ditinjau oleh pemerintah sebanyak dua kali dalam periode analisis. Kenaikan harga BBM, terutama kenaikan yang terakhir yang mencapai hampir seratus persen berdampak sangat serius kepada keluarga miskin. Kenaikan harga BBM diikuti oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan dan harga produk pertanian secara signifikan. Semuanya itu mempersulit kehidupan keluarga.

f. Keluarga Sejahtera III

Tabel 19. Keluarga Sejahtera III Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Keluarga	%
01	Luwu	9.441	9.519	78	0.83
02	Tana	7.752	8.152	400	5.16
03	Toraja	20.375	20.571	196	0.96
04	Pinrang	5.946	6.556	610	10.26
05	Enrekang	14.221	14.965	744	5.23
06	Sidrap	19.122	18.723	(399)	(2.09)
07	Wajo	21.258	20.891	(367)	(1.73)
08	Soppeng	5.852	5.953	101	1.73
09	Barro	12.776	12.708	68	(0.53)
10	Pangkep	32.214	32.790	576	1.79
11	Bone	11.823	12.582	759	6.42
12	Maros	16.786	17.016	230	1.37
13	Gowa	11.240	11.056	(184)	(1.64)
14	Sinjai	11.186	11.641	455	4.07
15	Bufukumba	2.092	2.436	344	16.44
16	Bantaeng	2.411	2.319	(92)	(3.82)
17	Jeneponto	11.182	10.883	(299)	(2.67)
18	Takalar	8.698	13.139	4.441	51.06
19	Selayar	40.019	39.602	(417)	(1.04)
20	Makassar	7.359	7.658	299	4.06
21	Pare-Pare	7.970	6.828	(1.141)	(14.33)
22	Luwu Utara	4.756	4.555	(201)	(4.23)
23	Palopo	5.962	5.757	(205)	(3.44)
	Luwu Timur				
Jumlah		290.441	296.300	5.859	2.02

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

Tabel 19 menunjukkan bahwa Keluarga Sejahtera III di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 2004 mengalami peningkatan sebanyak 5.859 keluarga (2.02%). Pertumbuhan itu menunjukkan adanya perbaikan struktur kesejahteraan keluarga, baik pada sisi pemenuhan kebutuhan pokok alasan ekonomi maupun bukan alasan ekonomi seperti pendidikan, akses informasi, dan pemeliharaan kesehatan. Namun demikian, di beberapa kabupaten justru terjadi penurunan, meliputi : Kabupaten Luwu Utara (1.141 keluarga atau 14,33%), Makassar (417 keluarga atau 1.04%), Wajo (399 keluarga), Soppeng (367 keluarga), Takalar (299 keluarga), Luwu Timur (205 keluarga), Palopo (201 keluarga), Sinjai (184 keluarga) dan Jeneponto (92 keluarga). Penurunan itu terutama dipicu oleh tekanan musim kemarau yang kering dan panjang, sehingga terjadi penurunan hasil panen, baik padi sawah maupun perkebunan. Khusus untuk Kota Makassar, penurunan jumlah keluarga Sejahtera III ini dipicu oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

g. Keluarga Sejahtera III+

Secara umum, jumlah keluarga Sejahtera III+ di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebanyak 737 keluarga atau 1.18%. Namun demikian di beberapa daerah terjadi penurunan, seperti Kabupaten Luwu, Enrekang, Pengkep, Bone, Maros, Jeneponto, Selayar, Parepare dan Palopo. Penurunan jumlah keluarga Sejahtera III+ di beberapa daerah ini mengindikasikan, bahwa keluarga yang sudah mapan di beberapa daerah dimaksud telah mengalami pergeseran, baik karena alasan ekonomi maupun non-ekonomi. PHK dan pemulangan TKI/ TKW dari Malaysia memiliki dampak terhadap penurunan itu.

Penurunan Keluarga Sejahtera III+ ini juga tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak. Bagaimanapun juga kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga semua bahan kebutuhan pokok, termasuk jasa transportasi, tetapi tidak diikuti secara signifikan oleh kenaikan pendapatan, pasti berdampak kepada kehidupan keluarga, termasuk Keluarga Sejahtera III+.

Tabel 20. Keluarga Sejahtera III+ Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2004

No	Kabupaten/ Kota	2003	2004	Pertumbuhan	
				Keluarga	%
01	Luwu	1.586	1.310	(276)	(17.40)
02	Tana Toraja	47	55	8	17.02
03	Pinrang	5.654	5.793	139	2.46
04	Enrekang	1.719	1.582	(137)	(7.97)
05	Sidrap	2.080	2.071	(9)	(0.43)
06	Wajo	2.801	2.863	62	2.21
07	Soppeng	1.462	1.475	13	0.89
08	Barru	1.539	1.547	8	0.52
09	Pangkep	2.896	2.806	(90)	(3.11)
10	Bone	6.651	6.442	(209)	(3.14)
11	Maros	4.416	4.272	(144)	(3.26)
12	Gowa	2.166	2.259	93	4.29
13	Sinjai	1.280	1.321	41	3.20
14	Bulukumba	2.143	2.275	132	6.16
15	Bantaeng	586	611	25	4.27
16	Jeneponto	502	470	(32)	(6.37)
17	Takalar	2.384	2.455	71	2.98
18	Selayar	1.096	921	(175)	(15.97)
19	Makassar	15.493	16.774	1.281	8.27
20	Pare-Pare	2.227	2.209	(18)	(0.81)
21	Luwu Utara	1.303	1.083	(220)	(16.88)
22	Palopo	554	540	(14)	(2.53)
23	Luwu Timur	1.625	1.816	191	11.75
Jumlah		62.213	62.950	737	1.18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah

C. Karakteristik Responden

Pada laporan akhir ini, jumlah responden yang ditabulasi datanya adalah sebanyak 800 orang sesuai dengan jumlah responden yang direncanakan. Responden tersebut menjadi subyek untuk mendapatkan data primer, baik melalui wawancara maupun melalui instrumen kuesioner. Karakteristik responden ditabulasi datanya dalam Tabel 21 yang bersumber dari 10 kabupaten/kota, 20 kecamatan, dan 40 desa/kelurahan. Berdasarkan Tabel 21 dapat dijelaskan bahwa sebahagian besar dari responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 638 orang (79%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 162 orang (21%).

Umur responden adalah berkisar antara 22 tahun hingga 80 tahun. Responden yang berumur 50 tahun keatas jumlahnya cukup besar yaitu sebanyak 375 orang (46,87%), kemudian diikuti oleh responden yang berumur 41 – 50 tahun sebanyak 269

orang (33,63%), responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 124 orang (15,50%), responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 32 orang (4,00%).

Sebahagian besar dari responden berstatus sudah kawin, yaitu sebanyak 619 orang (77,38%), belum kawin sebanyak 56 orang (7,00%), berstatus duda sebanyak 17 orang (2,13%), dan berstatus janda sebanyak 108 orang (13,50%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 359 orang (44,88%) dari responden adalah tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan sebanyak 281 orang (35,13%) dari adalah tamat Sekolah Dasar. Sedangkan sisanya sebanyak 160 orang (20,01%) dari responden adalah tamat SLTP dan tamat SLTA.

Responden umumnya berasal dari wilayah pedesaan, sehingga pekerjaan pokok responden adalah kebanyakan di sektor pertanian, yaitu sebanyak 411 orang (51,38%), tukang kayu atau batu sebanyak 64 orang (8%), jual-jualan sebanyak 102 orang (12,75%), buruh sebanyak 83 orang (10,38%), nelayan sebanyak 24 orang (3,00%), dan lainnya sebanyak 96 orang (12,00%).

Pendapatan responden berkisar antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 500.000 per bulan, dimana responden yang berpendapatan \leq Rp. 250.000,- adalah sebanyak 472 orang (59,00% dan yang berpendapatan Rp. 250.001 – Rp. 500.000,- sebanyak 328 orang (41,00%).

b. Rumah Kontrakan	69	8,37
c. Ikut Saudara	47	5,88
d. Ikut Mertua	83	10,34
e. Lainnya	16	2,00

Sumber : Data primer, diolah, 2005

Jumlah anak dan tanggungan responden berkisar hingga 8 orang. Responden yang jumlah anaknya ≤ 3 orang adalah sebanyak 398 orang (62,19%), yang berkisar antara 4 sampai 6 orang adalah sebanyak 312 orang (37,19%), dan lebih dari 6 orang sebanyak 4 orang (0,63%). Demikian pula halnya dengan jumlah tanggungan, dimana responden yang jumlah tanggungannya ≤ 3 orang adalah sebanyak 460 orang (57,50%), dan jumlah tanggungan yang berkisar antara 4 sampai 6 orang jumlahnya sebanyak 312 orang (39,00%), serta jumlah tanggungan lebih dari 6 orang adalah sebanyak 28 orang (3,50%).

Karakteristik responden berdasarkan status tempat tinggal adalah memiliki rumah sendiri (73,13%), rumah kontrakan (8,38%), ikut saudara (5,88%), dan ikut mertua (10,38%), serta lainnya (2,00%).

D. Hasil Evaluasi

1. Pengujian Data

1.1 Tidak Mengandung Data Outliers

Pembuktian hipotesis bersifat valid bilamana didasarkan pada informasi yang valid dan informasi bersifat valid jika diperoleh dari data yang berkualitas. Data yang mengandung *outliers* bersifat bias dan tidak berkualitas. Pemeriksaan ada tidaknya data *outliers* pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* AMOS 4.01 (lihat Lampiran 3). Hasilnya menunjukkan terdapat beberapa pengamatan yang bersifat *ouliers*, jarak Mahalanobis terhadap *centroid* bersifat signifikan ($p < 0.05$). Namun demikian secara diskriptif, selengkapnya disajikan pada Lampiran 3, diperoleh bahwa untuk semua item tidak ada nilai pengamatan yang berada di luar skor yang ditetapkan (minimum 1 dan maksimum 5), sehingga semua indikator tidak mengandung data outliers. Oleh karena itu, semua indikator dilibatkan didalam analisis lebih lanjut dan tidak ada yang dibuang.

b. Rumah Kontrakan	69	8,37
c. Ikut Saudara	47	5,88
d. Ikut Mertua	83	10,34
e. Lainnya	16	2,00

Sumber : Data primer, diolah, 2005

Jumlah anak dan tanggungan responden berkisar hingga 8 orang. Responden yang jumlah anaknya ≤ 3 orang adalah sebanyak 398 orang (62,19%), yang berkisar antara 4 sampai 6 orang adalah sebanyak 312 orang (37,19%), dan lebih dari 6 orang sebanyak 4 orang (0,63%). Demikian pula halnya dengan jumlah tanggungan, dimana responden yang jumlah tanggungannya ≤ 3 orang adalah sebanyak 460 orang (57,50%), dan jumlah tanggungan yang berkisar antara 4 sampai 6 orang jumlahnya sebanyak 312 orang (39,00%), serta jumlah tanggungan lebih dari 6 orang adalah sebanyak 28 orang (3,50%).

Karakteristik responden berdasarkan status tempat tinggal adalah memiliki rumah sendiri (73,13%), rumah kontrakan (8,38%), ikut saudara (5,88%), dan ikut mertua (10,38%), serta lainnya (2,00%).

D. Hasil Evaluasi

1. Pengujian Data

1.1 Tidak Mengandung Data Outliers

Pembuktian hipotesis bersifat valid bilamana didasarkan pada informasi yang valid dan informasi bersifat valid jika diperoleh dari data yang berkualitas. Data yang mengandung *outliers* bersifat bias dan tidak berkualitas. Pemeriksaan ada tidaknya data *outliers* pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* AMOS 4.01 (lihat Lampiran 3). Hasilnya menunjukkan terdapat beberapa pengamatan yang bersifat *ouliers*, jarak Mahalanobis terhadap *centroid* bersifat signifikan ($p < 0.05$). Namun demikian secara diskriptif, selengkapnya disajikan pada Lampiran 3, diperoleh bahwa untuk semua item tidak ada nilai pengamatan yang berada di luar skor yang ditetapkan (minimum 1 dan maksimum 5), sehingga semua indikator tidak mengandung data outliers. Oleh karena itu, semua indikator dilibatkan didalam analisis lebih lanjut dan tidak ada yang dibuang.

1.2 Normalitas Data

Analisis SEM membutuhkan asumsi data berdistribusi normal. Hasil pemeriksaan asumsi normalitas data disajikan pada Lampiran 2 (termasuk hasil analisis SEM dengan *software* AMOS 4.1), menunjukkan bahwa secara multivariate data tidak berdistribusi normal ($c.r = 227,863$, sedangkan nilai kritis Z pada $\alpha = 0.05$ adalah 1.96). Akan tetapi asumsi ini tidak bersifat kritis bilamana ukuran sampel besar. Merujuk pada Dalil Limit Pusat (*Limit Central Theorm*) bilamana ukuran sampel semakin besar, maka statistik yang diperoleh akan mendekati distribusi normal. Besar unit analisis pada penelitian ini $n = 800$ dipandang sudah memenuhi Dalil Limit Pusat, sehingga asumsi normalitas dapat diabaikan.

1.3 Linieritas

Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linear (garis lurus) dalam range variabel independen tertentu. Penelitian yang menggunakan analisis regresi disamping membutuhkan asumsi normalitas data, juga membutuhkan hubungan antar variabel bersifat linier. Hasil pemeriksaan asumsi linieritas pada penelitian ini dilakukan dengan SPSS 10, yaitu menggunakan *Curve Fit*, selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. Pendekatan yang digunakan merujuk pada konsep *parsimony*, yaitu bilamana seluruh atau sebagian model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua bentuk hubungan antar variabel yang terdapat di dalam model adalah linier, karena semua variabel menunjukkan modelnya signifikan. Dengan demikian asumsi linieritas terpenuhi.

2. Pengujian Model

2.1 Model Analisis SEM Tahap Awal

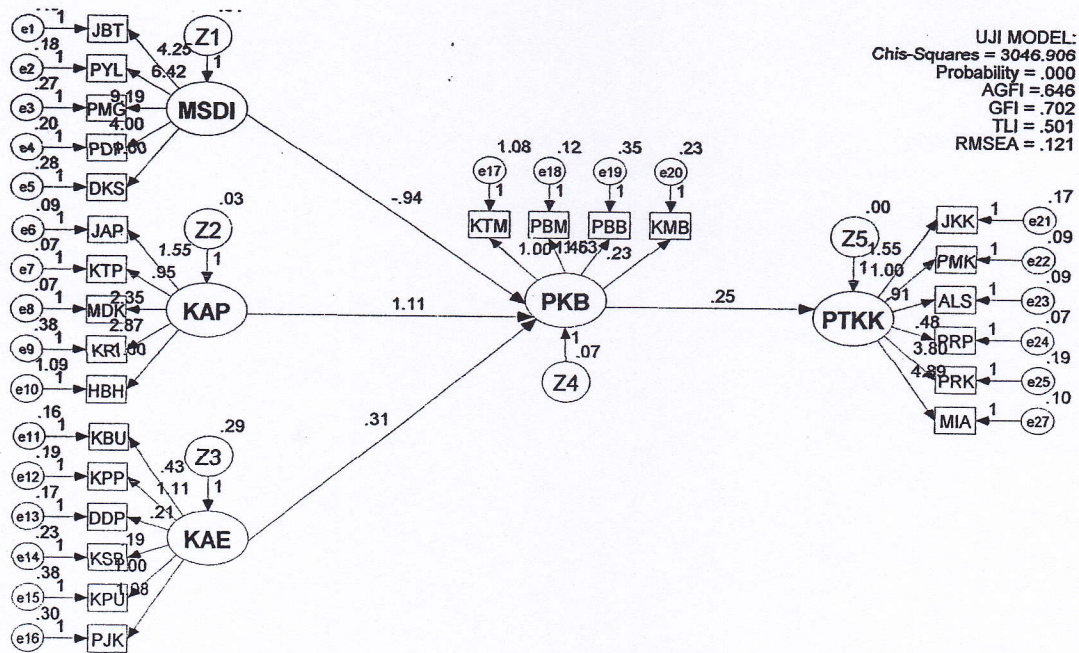
Model dikatakan baik bilamana pengembangan model hipotetik secara teoritis didukung oleh data empirik. Hasil analisis SEM pada tahap awal secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

Beberapa hasil uji *goodness of fit overall model* diberikan pada Tabel 22. Berdasarkan Tabel 22 tersebut dapat diketahui bahwa model yang diajukan belum layak digunakan. Berdasarkan petunjuk *modification indices* kemudian dilakukan modifikasi untuk memperbaiki model. Modifikasi model diutamakan hanya pada korelasi antar item dan atau *error* dan tidak memodifikasi jalur pengaruh. Hasil modifikasi tersebut disajikan sebagai berikut

Tabel 22. Pengujian Goodness of fit Overall Model Tahap Awal

<i>Goodness of fit</i>	Hasil Perhitungan	<i>Cut-off</i>	Keterangan
Chi-Square	3048.906	Diharapkan	Model Marginal
		K	
		e	
		ei	
		L	
RMSEA	0.121	≤ 0.08	Model Marginal
Probability	0.000	≥ 0.05	Model Marginal
GFI	0.702	≥ 0.90	Model Marginal
TLI	0.501	≥ 0.90	Model Marginal

Sumber : Hasil Perhitungan (Lampiran 3)



Gambar 3. Uji Goodness Of Fit Tahap Awal

Tabel 21 dan Gambar 3 merupakan Pengujian *Goodness of fit Overall Model* Tahap Awal. Pada pengujian tersebut Model SEM belum layak untuk dianalisis lebih lanjut, karena berdasarkan beberapa indikator seperti probability, GFI, TLI, dan RMSEA belum memenuhi standar yang dipersyaratkan SEM. Oleh karena itu model awal tersebut perlu dilakukan modifikasi indeks, seperti yang dilakukan pada tahap akhir berikut.

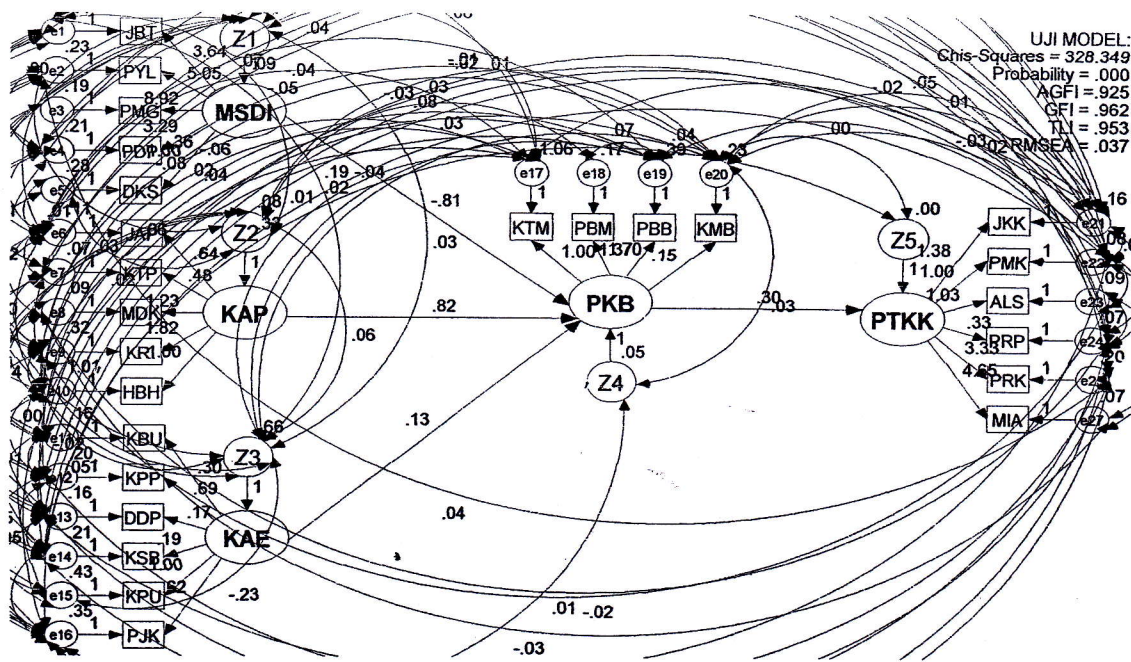
2.2 Model Analisis SEM Tahap Akhir

Hasil analisis SEM tahap awal menunjukkan bahwa model belum layak digunakan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk *modification indices* kemudian dilakukan modifikasi untuk memperbaiki model sehingga valid untuk pembuktian hipotesis. Modifikasi model diutamakan hanya pada korelasi antar item dan *error*, serta tidak memodifikasi jalur pengaruh. Hasil analisis SEM pada tahap akhir selengkapnya disajikan pada Tabel 23 dan output dalam bentuk diagram path disajikan sebagai berikut.

Tabel 23. Pengujian *Goodness of fit Overall Model* Tahap Akhir

<i>Goodness of fit</i>	Hasil Perhitungan	<i>Cut-off</i>	Keterangan
Chi-Square	311.434	Diharapkan Kecil	Model Baik
RMSEA	0.033	≤ 0.08	Model Baik
Probability	0.000	≥ 0.05	Model Kurang Baik
GFI	0.971	≥ 0.90	Model Baik
TLI	0.968	≥ 0.90	Model Baik

Sumber : Hasil Perhitungan (Lampiran 3)



Gambar 4. Uji Goodness Of Fit Tahap Akhir

Berdasarkan Tabel 23 dan Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa Indeks-indeks (GFI, TLI, dan RMSEA) menunjukkan tingkat penerimaan terhadap model tersebut, walaupun tingkat signifikansi (p) adalah sebesar 0. Namun demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesa nol yang menyatakan tidak ada perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi adalah dapat diterima. Dengan diterimanya hipotesa nol, berarti tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi, sehingga model layak digunakan.

3. Confirmatory Factor Analysis

Hasil analisis faktor konfirmatori seara lengkap termuat di dalam hasil analisis SEM, disajikan pada Lampiran 2.

3.1 Variabel Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI)

Loading factor dari variabel Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI) disajikan pada Tabel 24 sebagai berikut.

Tabel 24. Loading dari Variabel Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI)

Indikator	Loading Factor (p value)	Keterangan
Job Training (JBT)	4.165 (0.000)	Signifikan
Penyuluhan (PYL)	13.051(0.000)	Signifikan
Pemagangan (PMG)	23.383(0.000)	Signifikan

Pendampingan (PDP)	7.377(0.000)	Signifikan
Diklat Khusus (DKS)	1.000 (Fix)	Fix

Sumber : Hasil perhitungan (Lampiran 2)

Berdasarkan fakta empiris seperti pada Tabel 24 dapat dikatakan bahwa indikator Job Training (JBT), Penyuluhan (PYL), Pemagangan (PMG), dan Pendampingan (PDP) adalah merupakan indikator yang signifikan untuk mengukur Variabel Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI). Sedangkan indikator Diklat Khusus (DKS) adalah merupakan indikator dari variabel Variabel Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI) yang bersifat pasti atau *fix*.

3.2 Variabel Ketersediaan Alat Produksi (KAP)

Loading factor dari setiap indikator untuk variabel Ketersediaan Alat Produksi (KAP) disajikan pada Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Loading dari Variabel Ketersediaan Alat Produksi (KAP)

Indikator	Loading Factor (<i>p value</i>)	Keterangan
Jenis Alat Produksi (JAP)	3.361 (0.000)	Signifikan
Kapasitas Alat Produksi (KTP)	1.970 (0.000)	Signifikan
Modal Kerja (MDK)	6.110 (0.000)	Signifikan
Kredit Investasi (KRI)	5.876 (0.000)	Signifikan
Hibah (HBH)	1.000 (Fix)	Fix

Sumber : Hasil perhitungan (Lampiran 2)

Berdasarkan fakta empiris seperti pada Tabel 25 dapat dikatakan bahwa indikator Jenis Alat Produksi (JAP), Kapasitas Alat Produksi (KTP), Modal Kerja (MDK), dan Kredit Investasi (KRI) adalah merupakan indikator yang signifikan untuk mengukur Variabel Ketersediaan Alat Produksi (KAP). Sedangkan indikator Hibah (HBH) adalah merupakan indikator dari variabel Ketersediaan Alat Produksi (KAP) yang bersifat pasti atau *fix*.

3.3 Variabel Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)

Loading factor dari setiap indikator untuk variabel Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) disajikan pada Tabel 26 berikut ini. Berdasarkan fakta empiris seperti pada Tabel 26 dapat dikatakan bahwa indikator Kejelasan Bidang Usaha (KBU), Kepastian Pasar (KPP), Dukungan Desain Produk (DDP), Kepastian Pasar (KPP), dan

Perpajakan (PJK) adalah merupakan indikator yang signifikan untuk mengukur Variabel Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE). Sedangkan indikator Kemudahan Perizinan Usaha (KPU) adalah merupakan indikator dari variabel Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) yang bersifat pasti atau *fix*.

Tabel 26. Loading dari Variabel Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)

Indikator	Loading Factor (p value)	Keterangan
Kejelasan Bidang Usaha (KBU)	0.605 (0.000)	Signifikan
Kepastian Pasar (KPP)	1.234 (0.000)	Signifikan
Dukungan Desain Produk (DDP)	0.181 (0.000)	Signifikan
Kepastian Sumber Bahan (KSB)	0.174 (0.000)	Signifikan
Kemudahan Perizinan Usaha (KPU)	1.000 (Fix)	Fix
Perpajakan (PJK)	1.076 (0.000)	Signifikan

Sumber : Hasil perhitungan (data diolah dari Lampiran 2)

3.4 Variabel Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK)

Loading factor dari setiap indikator untuk variabel Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK) disajikan pada Tabel 27 berikut ini.

Tabel 27. Loading dari Variabel Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK)

Indikator	Loading Factor (p value)	Keterangan
Jumlah Kalori dikonsumsi (JKK)	0.814 (0.000)	Signifikan
Pendapatan Rumah Tangga (PMK)	1.000 (Fix)	Fix
Anak yang Lanjut Studi (ALS)	1.133 (0.000)	Signifikan
Perubahan Pendapatan (PRP)	0.357 (0.000)	Signifikan
Perawatan Kesehatan (PRK)	5.220 (0.000)	Signifikan
Menjalankan Ibadah (MIA)	5.342 (0.000)	Signifikan

Sumber : Hasil perhitungan (data diolah dari Lampiran 2)

Berdasarkan fakta empiris seperti pada Tabel 27 dapat dikatakan bahwa indikator Jumlah Kalori dikonsumsi (JKK), Anak yang Lanjut Studi (ALS), Perubahan Pendapatan (PRP), Perawatan Kesehatan (PRK) dan Menjalankan Ibadah (MIA) adalah merupakan indikator yang signifikan untuk mengukur Variabel Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK). Sedangkan indikator Pendapatan Memenuhi kebutuhan Rumah Tangga (PMK) adalah merupakan indikator dari variabel Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK) yang bersifat pasti atau *fix*.

3.5 Variabel Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)

Loading factor dari setiap indikator untuk variabel Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB) disajikan pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 28. Loading dari Variabel Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)

Indikator	Loading Factor (p value)	Keterangan
Keterampilan Sesuai Bidang Usaha yang dimiliki (KTM)	1.000 (Fix)	Fix
Pengalaman Bekerja Mandiri di Sektor Formal dan Informal (PBM)	1.740 (0.000)	Signifikan
Pengalaman Bekerja Sebagai Buruh (PBB)	2.397 (0.000)	Signifikan
Keterampilan Memanfaatkan Barang Bekas (KMB)	1.149 (0.042)	Signifikan

Sumber : Hasil perhitungan (data diolah dari Lampiran 3)

Berdasarkan fakta empiris seperti pada Tabel 28 dapat dikatakan bahwa indikator Pengalaman Bekerja Mandiri di Sektor Formal dan Informal (PBM), Pengalaman Bekerja Sebagai Buruh (PBB), dan indikator Keterampilan Memanfaatkan Barang Bekas (KMB) adalah merupakan indikator yang signifikan untuk mengukur Variabel Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB). Sedangkan indikator Keterampilan Sesuai Bidang Usaha yang dimiliki (KTM) adalah merupakan indikator dari variabel Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB) yang bersifat pasti atau fix.

E. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hasil analisis SEM menggunakan software AMOS 4.01 secara lengkap disajikan pada Lampiran 3. Analisis SEM pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar jalur-jalur pada model struktural yang signifikan. Untuk mengetahui jalur-jalur hubungan (pengaruh) yang signifikan dapat dilihat pada uji koefisien path secara parsial. Hasil uji secara parsial terhadap koefisien path pada setiap jalur dapat dilihat pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 29. Hubungan antar Variabel Penelitian

Jalur	Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Path (p - value)	Keputusan
1	Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI)	Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)	-3.839 (0.012)	Signifikan
2	Ketersediaan Alat Produksi (KAP)	Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)	1.722 (0.000)	Signifikan
3	Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE)	Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)	0.507 (0.000)	Signifikan
4	Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB)	Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK)	0.294 (0.000)	Signifikan

Sumber : Hasil perhitungan (data diolah dari Lampiran 3)

Hasil analisis SEM pada Tabel 29 menunjukkan bahwa Ketersediaan Alat Produksi (KAP) dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB). Begitu pula halnya dengan Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan Keluarga (PTKK). Sedangkan Peningkatan Sumber Daya Insani (MSDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesempatan Bekerja (PKB). Hal ini berarti bahwa (1) kesempatan bekerja bagi masyarakat miskin akan mengalami peningkatan apabila ada program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam aktifitas ekonomi dan menyediakan alat-alat produksi yang dapat menunjang usaha yang mereka lakukan; (2) Keluarga miskin (masyarakat) yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki sumber daya insani yang rendah, sehingga menyebabkan pula rendahnya kesempatan bekerja bagi mereka; dan (3) Program peningkatan kesempatan bekerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan keluarga, walaupun kesempatan bekerja bagi masyarakat miskin tersebut masih sangat rendah.

F. Analisis Pemecahan Masalah

1. Permasalahan Pertama

Berdasarkan atas hasil analisis SEM dengan perangkat lunak Amos 4.1 dan *Confirmatory Factor Analysis* (analisis faktor kofirmatori) di atas, terbukti bahwa variabel Mutu Sumber Daya Insani (MSDI), Ketersediaan Alat-alat Produksi (KAP), dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) secara bersama-sama menjadi faktor yang berpengaruh kepada kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis Faktor Konfirmatori adalah suatu teknik yang sangat canggih yang digunakan dengan mengedepankan langkah-langkah terkait proses riset untuk menguji suatu teori yang memakai proses laten (tidak kasat mata/tidak diobservasi langsung). Indikator variabel (konstruk laten) secara hati-hati dan secara rinci dipilih untuk mengungkapkan hal-hal yang mendasari proses (Tabachnick dan Fidell dalam Augusty Ferdinand, 2002). Tepatnya, peralatan ini sangat baik dipakai untuk menguji pengaruh berbagai variabel independen terhadap sebuah variabel dependen atau lebih, dimana setiap variabel dibangun oleh beberapa indikator (konstruk); dan analisis dilakukan secara serentak dengan mempergunakan nilai setiap indikator dimaksud.

Dalam Tabel 3 di muka sudah dikemukakan indikator setiap variabel penelitian. Variabel MSDI memiliki lima indikator, yaitu job training, penyuluhan, pemagangan, pendampingan dan diklat khusus. Variabel KAP juga memiliki lima indikator, yaitu jenis alat produksi, kapasitas alat produksi, modal kerja, kredit investasi, dan bantuan hibah. Variabel KAE ini memiliki enam indikator, yaitu kejelasan bidang usaha yang dijalankan, kepastian pasar hasil produksi, dukungan bantuan disain, kepastian sumber bahan, kemudahan perizinan usaha, dan keringanan pajak.

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 23, 24, 25 dan 26 menunjukkan bahwa semua indikator setiap variabel independen yang dipakai dalam model adalah berpengaruh signifikan hingga fix (mutlak) terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator yang mutlak pengaruhnya (fix) pada variabel MSDI ialah Diklat khusus, dan pada KAP adalah indikator hibah, dan pada variabel KAE ialah indikator kemudahan perizinan usaha. Semua indikator lainnya berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan, untuk memecahkan masalah kemiskinan ini, pemerintah daerah mutlak harus menyelenggarakan pendidikan dan latihan kerja khusus kepada keluarga miskin, memberinya peralatan produksi yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalanannya,

serta kemudahan dibidang perizinan usaha. Disamping itu, perlu pula menerapkan aktivitas yang dicerminkan oleh indikator lainnya.

Praktek dilapangan sekarang ini menunjukkan, disamping lapangan kerja terbatas, kaum miskin yang menjadi pekerja informal, khususnya pedagang kaki-lima justru paling banyak menjadi korban penertiban di perkotaan tanpa solusi yang jelas dan yang berkemampuan mengurangi kemiskinan. Pejabat lebih banyak perhatian pada pembangunan fasilitas untuk kaum berada, seperti pusat perbelanjaan mewah semakin banyak dibangun. Dilain pihak, lapangan usaha pedagang tradisional dan pedagang informal justru semakin terdesak sehingga dalam jangka panjang, model pembangunan yang dilaksanakan sekarang cenderung akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk dan keluarga miskin.

2. Permasalahan Kedua

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa :

- a. Pendapatan masyarakat miskin adalah rendah. Lebih dari 60% kurang daripada Rp250,000 per bulan per rumah tangga. Selebihnya adalah antara Rp250,000 sampai Rp350.000 per bulan per rumah tangga.
- b. Konsumsi per hari per orang di pedesaan sekitar 1.800 sampai 1.900 kalori, sedang diperkotaan justru lebih serius, hanya sekitar 1.600 – 1.750 kalori per orang per hari.
- c. Jumlah keluarga sangat miskin (pra sejahtera) mengalami peningkatan (lihat Tabel 13, dimana keluarga pra sejahtera meningkat 5.47%). Sebaliknya, jumlah keluarga Sejahtera III dan Sejahtera III+ justru mengalami penurunan pada 9 – 11 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dalam tahun 2004, sekalipun secara total, angka Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan.

Dengan data di atas, maka program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintahan belum berhasil menurunkan jumlah penduduk atau keluarga miskin. Bahkan sesudah dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk memberikan Bantuan Tunai Langsung kepada keluarga miskin sebesar Rp100,000 per keluarga per bulan dan dibayarkan tiga bulan sekali, menunjukkan, jumlah keluarga miskin semakin banyak dan bahkan melebihi perkiraan. Koordinasi lintas instansi sangat lemah. Sekalipun ditingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah dibentuk Komite Pengentasan Kemiskinan pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, namun koordinasi ke instansi yang melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di daerah bawahan belum efektif seperti yang diharapkan. Kesimpulan ini dibuat berhubung masih ada instansi tingkat kabupaten yang belum mengetahui lembaga atau instansi yang menjadi koordinator penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam usaha memecahkan permasalahan kemiskinan ini, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan :

- a. Menunjuk instansi/dinas yang bertanggungjawab secara struktural terhadap usaha pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Untuk memudahkan dan mengefektifkan koordinasi, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan regionalisasi wilayah dalam usaha melakukan pengentasan kemiskinan. Regionalisasi itu dapat memakai pola pendekatan Pembantu Gubernur dahulu, atau perwilayahan pengembangan yang selama ini sudah diterapkan, seperti Maminasata, Bosowa, Karaeng Lompo, dan lain lain. Atau merumuskan regionalisasi baru berdasarkan kedekatan kesejarahan, kultur, serta kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Dengan adanya instansi yang bertanggungjawab dimasing-masing kabupaten/kota sebagai koordinator pengentasan kemiskinan, maka program pengentasan akan semakin efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Program dan anggaran akan semakin efektif pemanfaatannya. Dengan adanya kerjasama lintas wilayah secara regionalisasi, maka masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota terkait akan semakin mudah memantapkan programnya. Program yang memiliki keterkaitan secara wilayah, akan mudah dikoordinasikan dan dipecahkan bersama. Pertukaran pengalaman akan semakin mudah dilakukan.

3. Permasalahan Ketiga

Hasil analisis dengan mempergunakan metode SEM dan perangkat lunak Amos 4.1 pada Tabel 29 menunjukkan bahwa variabel MSDI, KAP dan KAE berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja (PKB), dan selanjutnya PKB tersebut berpengaruh terhadap pengurangan penduduk atau keluarga miskin di Sulawesi Selatan.

Hasil itu membuktikan bahwa model yang diajukan, yang bertumpu di atas pilar peningkatan mutu sumber daya insani, peningkatan ketersediaan alat-alat produktif

masyarakat miskin, dan peningkatan keterlibatan/ partisipasinya dalam kegiatan ekonomi, adalah model yang mampu menanggulangi dan mengurangi keluarga miskin di Sulawesi Selatan. Lebih rinci, strategi dan model pengendatan itu akan diuraikan lebih rinci dalam subbab mendatang.

G. Rekomendasi Kebijakan

1. Kerangka Acuan Kebijakan

Kemiskinan pada dasarnya merupakan suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan, terjadi bukan karena kehendak oleh yang bersangkutan, melainkan oleh suatu tekanan keterpaksaan yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan mereka sendiri. Kemiskinan itu ditandai antara lain oleh faktor lemahnya nilai tukar hasil produksi mereka. Rendahnya nilai tukar hasil produksi mereka disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Ketunamutuan sumberdaya insaniah yang mereka gunakan dalam berproduksi.
2. Keterbatasan modal yang dipergunakan dalam proses produksi.
3. Ketunamutuan dan keterbatasan faktor/peralatan produksi yang diper-gunakan oleh warga miskin dalam aktivitas produksi.
4. Produktivitas yang sangat rendah.
5. Mutu keluaran yang sangat rendah.
6. Kesulitan akses pasar dari keluaran yang dihasilkan.

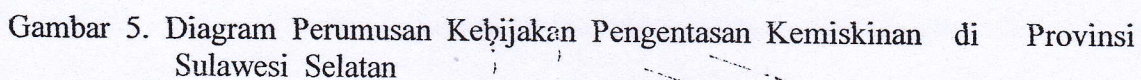
Berbagai program telah dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan ini, misalnya Inpres Desa Tertinggal, kemitraan usaha (Bapak angkat-Anak angkat), subsidi BBM, bantuan BUMN, dan sebagainya. Program itu kelihatannya tidak memberikan makna yang signifikan karena jumlah penduduk miskin tidak berkurang, bahkan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Memperhatikan uraian di atas, dapat diidentifikasi berbagai langkah yang perlu ditangani dalam program pengentasan kemiskinan, yaitu :

1. Sasaran program pengentasan kemiskinan harus jelas dan konkret.
2. Komitmen pemerintah, termasuk pemerintah daerah yang sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Program operasi pengentasan kemiskinan yang jelas dan berorientasi pada sasaran.
4. Pendekatan operasi pengentasan kemiskinan yang bersifat *bottom-up*.

- Bidang-bidang atau aspek yang harus ditangani meliputi:**

- Sehubungan dengan pemikiran itu, dirumuskan kerangka kebijakan pengentasan kinerja di Provinsi Sulawesi Selatan seperti pada gambar berikut ini.



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus benar-benar memiliki data penduduk miskin yang akan dientaskan kemiskinannya. Program pengentasannya, juga harus jelas dan sesuai dengan hakikat kelompok penduduk miskin yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan program dimaksud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menetapkan Bank mitra program, serta BUMN dan BUMS yang juga menjadi mitra, yaitu bank yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan permodalan, baik bantuan modal kerja maupun untuk pengadaan alat-alat produktif. BUMN dan BUMS adalah perusahaan nasional yang memerlukan produk atau komponen produk akhir. Berdasarkan atas kepentingan bisnisnya, maka BUMS mitra menyediakan disain dari produk atau komponen produk dimaksud dari kelompok usaha penduduk miskin peserta program. Praktik seperti ini ditempuh di berbagai negara, seperti Jepang dan Malaysia. Dengan demikian, keluaran dari usaha penduduk miskin peserta program akan memiliki jaminan pasar yang pasti yang menjanjikan pendapatan yang berkesinambungan.

Untuk menjamin mutu proses dan hasil produksi di tingkat kelompok usaha penduduk miskin peserta program, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menunjuk Perguruan Tinggi setempat sebagai mitra untuk memberikan :

1. Bimbingan teknis produksi.
2. Bimbingan pelaksanaan proses usaha yang dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, dan produktif.
3. Bimbingan manajemen dan akuntansi usaha.

Untuk kelompok penduduk miskin yang berlatar belakang petani, maka peserta program diorganisasi dalam usaha :

1. Pemeliharaan lebah madu dan memproduksi madu alam (asli).
2. Bertani organik (memanfaatkan pupuk organik yang dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan lokal) untuk menghasilkan sayur mayur dan buah-buahan jangka pendek (anggur, pepaya, pisang, dan lain lain).

Ibu rumah tangga/anak remaja penduduk miskin peserta program dapat dilatih untuk menjalankan usaha penjahitan, membuat kue, dan jajan sehat. Kelompok usaha yang dijalankan penduduk miskin peserta program, seharusnya tidak merupakan jenis usaha yang asing dengan kehidupan dan keahlian mereka.

serta rancangan pemecahan yang diusulkan. Untuk mengkonkretkan pemecahan masalah dimaksud, pada bidang ekonomi dirumuskan strategi berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun rancangan kebijakan lintas wilayah satuan pemerintahan dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan secara terpadu dan terarah.
- b. Menyediakan sarana pemasaran di perkotaan yang memadai dan kondusif dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat pedesaan, termasuk warga miskin yang berpihak kepada kepentingan warga miskin dimaksud.
- c. Melakukan upaya perbaikan mutu sumberdaya manusia dan teknologi produksi sektor primer (pertanian, perikanan, dan perkebunan) dan perbaikan layanan pascapanen.

Dalam perumusan kebijakan lintas wilayah satuan pemerintahan ini, perlu memperhatikan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, bahwa : variabel Mutu Sumber Daya Insani (MSDI), Ketersediaan Alat-alat Produksi (KAP), dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) secara bersama-sama menjadi faktor yang berpengaruh kepada kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Tabel 3 di muka sudah dikemukakan indikator setiap variabel penelitian. Variabel MSDI memiliki lima indikator, yaitu job training, penyuluhan, pemagangan, pendampingan dan diklat khusus. Variabel KAP juga memiliki lima indikator, yaitu jenis alat produksi, kapasitas alat produksi, modal kerja, kredit investasi, dan bantuan hibah. Variabel KAE ini memiliki enam indikator, yaitu kejelasan bidang usaha yang dijalankan, kepastian pasar hasil produksi, dukungan bantuan disain, kepastian sumber bahan, kemudahan perizinan usaha, dan keringanan pajak.

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 23, 24, dan 25 menunjukkan bahwa semua indikator setiap variabel independen yang dipakai dalam model adalah berpengaruh signifikan hingga fix (mutlak) terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian Rumusan Program Induk setidaknya mencakup :

- a. Peningkatan mutu sumberdaya insani masyarakat miskin dengan sub-program :
 - (1) Menyelenggarakan *job-training* (latihan kerja), guna membekali mereka keterampilan kerja khas untuk dapat melaksanakan kegiatan produktif tertentu, seperti : latihan kerja tambal ban, latihan servis motor (sekarang sampai dipedesaan, banyak sekali ojek roda dua), latihan kerja membudidayakan ikan

serta rancangan pemecahan yang diusulkan. Untuk mengkonkretkan pemecahan masalah dimaksud, pada bidang ekonomi dirumuskan strategi berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun rancangan kebijakan lintas wilayah satuan pemerintahan dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan secara terpadu dan terarah.
- b. Menyediakan sarana pemasaran di perkotaan yang memadai dan kondusif dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat pedesaan, termasuk warga miskin yang berpihak kepada kepentingan warga miskin dimaksud.
- c. Melakukan upaya perbaikan mutu sumberdaya manusia dan teknologi produksi sektor primer (pertanian, perikanan, dan perkebunan) dan perbaikan layanan pascapanen.

Dalam perumusan kebijakan lintas wilayah satuan pemerintahan ini, perlu memperhatikan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, bahwa : variabel Mutu Sumber Daya Insani (MSDI), Ketersediaan Alat-alat Produksi (KAP), dan Keterlibatan Dalam Aktivitas Ekonomi (KAE) secara bersama-sama menjadi faktor yang berpengaruh kepada kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Tabel 3 di muka sudah dikemukakan indikator setiap variabel penelitian. Variabel MSDI memiliki lima indikator, yaitu job training, penyuluhan, pemagangan, pendampingan dan diklat khusus. Variabel KAP juga memiliki lima indikator, yaitu jenis alat produksi, kapasitas alat produksi, modal kerja, kredit investasi, dan bantuan hibah. Variabel KAE ini memiliki enam indikator, yaitu kejelasan bidang usaha yang dijalankan, kepastian pasar hasil produksi, dukungan bantuan disain, kepastian sumber bahan, kemudahan perizinan usaha, dan keringanan pajak.

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 23, 24, dan 25 menunjukkan bahwa semua indikator setiap variabel independen yang dipakai dalam model adalah berpengaruh signifikan hingga fix (mutlak) terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian Rumusan Program Induk setidaknya mencakup :

- a. Peningkatan mutu sumberdaya insani masyarakat miskin dengan sub-program :
 - (1) Menyelenggarakan *job-training* (latihan kerja), guna membekali mereka keterampilan kerja khas untuk dapat melaksanakan kegiatan produktif tertentu, seperti : latihan kerja tambal ban, latihan servis motor (sekarang sampai dipedesaan, banyak sekali ojek roda dua), latihan kerja membudidayakan ikan

kerambah (di pinggiran laut, sungai, atau danau), bertani rumput laut lepas pantai, serta bertani mina-padi (dahulu dizaman orde baru program seperti ini berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat), dan sebagainya.

- (2) Mengefektifkan pelaksanaan penyuluhan, meliputi : Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kerajinan rumah tangga, menye-lenggarakan usaha kecil (warung kopi, warung nasi, kedai kebutuhan pokok di rumah tangga). Untuk mengoptimalkan hasil kegiatan penyuluhan dimaksud, maka sebaiknya para penyuluh memilih beberapa usaha untuk dibina dan dijadikan model percontohan. (Misalnya saja, sawah di pedesaan, dimusim bertanam padi, sisi kiri dan kanan dari pematang sawah dapat ditanami aneka macam sayuran yang bernilai ekonomi tinggi. Atau di bagian tengah sawah, dibuat urukan untuk ditanami mangga golek tiga pohon setiap petak sawah yang cukup luas, berukuran sekitar 20 are ke atas. Pohon mangga selain dipakai sebagai naungan tempat istirahat, pada gilirannya nanti, dapat menghasilkan mangga berkualitas tinggi yang akan menambah penghasilan. Atau membuat saluran pembuangan air di sawah yang diolah yang cukup dalam, sehingga tercipta kolam mini yang dapat dipakai memelihara ikan mas, ikan lele dumbo, dan lain lain).
- (3) Pelaksanaan pemagangan. Kepala rumah tangga keluarga miskin, atau ibu rumah tangga, atau anak-anak mereka yang sudah selesai pendidikan sekolah menengah yang belum sempat lanjut ke pendidikan tinggi, diikutkan dalam program magang pada usaha binaan yang telah ada (usaha yang dibina oleh para penyuluh lapang), atau kerjasama dengan pengusaha kecil yang ada di desa/di kota yang bersangkutan. Dari pemagangan itu, diharapkan mereka mampu bekerja mandiri sehingga memiliki kesempatan untuk berpenghasilan diluar sektor pertanian.
- (4) Pendampingan. Menempatkan tenaga penyuluh lapang, tenaga perguruan tinggi, atau tenaga sukarela dari LSM untuk menjadi pendamping atau konsultan teknis dari usaha yang dijalankan masyarakat miskin.
- (5) Pendidikan dan latihan kerja khusus. Diklat khusus diberikan untuk memberikan keterampilan kepada warga miskin sesuai potensi insaniah dan

bakat mereka masing-masing. Diklat ini diberikan untuk dapat membuka usaha mandiri, misalnya : Latihan membuat telur asin, asinan buah, jus buah, menjahit, membatik, membuat ikan asin, teknik sablon, dan sebagainya.

b. Program ketersediaan alat-alat produksi (KAP), adalah program yang ditujukan untuk membekali warga miskin akan alat-alat produktif. Program ini mencakup subprogram :

- (1) Menyediakan alat-alat produksi yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usaha warga miskin yang dibina. Misalkan, pada usaha penjahitan, tidak perlu semua anggota menyediakan mesin obras. Cukup mengusahakan mesin jahit biasa. Mesin obras diserahkan kepada Unit Usaha Koperasi untuk dioperasikan guna memenuhi kebutuhan anggota akan jasa mesin obras (jahit pinggir dan jahit lubang kancing). Untuk menunjang usaha sablon (termasuk membuat baju sablonan), tidak perlulah semua pengrajin memiliki komputer grafis dan disain. Cukup pada Unit Usaha Koperasi yang mengusahakan layanan jasa grafis dan disain sesuai kebutuhan anggota, dan lain lain.
- (2) Menyediakan peralatan dengan kapasitas alat produksi yang seimbang dengan kebutuhan.
- (3) Menyediakan fasilitas kredit untuk investasi pengadaan alat-alat kerja dengan paket yang terbatas, cukup untuk menjalankan usaha kerajinan di rumah (membeli mesin jahit, peralatan sablon), dan modal kerja yang berbunga lunak dan jangka waktu yang sesuai.
- (4) Menyediakan fasilitas kredit investasi untuk memenuhi kebutuhan permodalan dari binaan yang sudah berkembang dan bersyarat untuk diberikan pinjaman komersial, dan
- (5) Menyediakan bantuan hibah alat-alat produksi untuk dipakai bersama oleh kelompok masyarakat miskin yang dibina (pompa air untuk keperluan pengairan di pedalaman, mesin traktor tangan untuk dikelola oleh kelompok tani, dan lain lain).

c. Keterlibatan dalam Aktivitas Ekonomi (KAE), dengan subprogram :

- (1) Memperjelas bidang usaha yang dijalankan oleh setiap anggota yang berada dibawah binaan Unit Usaha Bersama Masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan tertentu. Unit Usaha ini mengkoordinir kelompok usaha yang

ada, dan dijalankan oleh anggota dari para keluarga miskin. Dengan adanya kejelasan usaha yang dijalankan, maka akan dapat diminimumkan persaingan antar masyarakat miskin, serta betul-betul sesuai bakat dan potensi insaniah masing-masing.

- (2) Memberikan kepastian pasar hasil produksi yang dihasilkan oleh masing-masing anggota yang tergabung dalam suatu kelompok usaha tertentu. Kepastian pasar ini yang menjadi akar masalah yang perlu rumusan pemecahan dari awal pelaksanaan program. Manajer Kelompok Usaha dan Manajer Umum Unit Usaha Bersama Masyarakat perlu membangun kemitraan dengan pengusaha di kota kabupaten atau di Makassar. Usaha mendapatkan pasar ini perlu mendapatkan respon yang baik dari instansi terkait.
- (3) Memberikan dukungan bantuan disain. Pengusaha mitra (dahulu lazim disebut Bapak Angkat) selain kemitraan untuk membeli produk yang mereka hasilkan, juga memberikan bantuan disain produk yang dibutuhkan, termasuk detil mutunya. Dengan demikian, pengusaha mitra akan memperoleh kepastian jaminan mutu dan usaha masyarakat miskin akan memperoleh jaminan kepastian pasar.
- (4) Bantuan jaminan kepastian sumber bahan. Perusahaan mitra, dan juga instansi pemerintah terkait, harus memiliki kepedualian untuk membantu tersedianya bahan baku yang diperlukan oleh usaha-usaha yang dibina oleh Unit Usaha Bersama Masyarakat. Jaminan ketersediaan bahan baku itu, akan menjadi pendukung kesinambungan usaha.
- (5) Pemerintah daerah harus memberi kemudahan perizinan usaha atas usaha yang diselenggarakan oleh warga miskin. Penertiban kaki-lima harus diikuti solusi yang tidak merugikan dan tidak menghilangkan kesempatan berusaha warga miskin. Pasar-pasar tradisional harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada ruang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlakuan yang baik kepada mereka akan menghapus dengan sendirinya pasar-pasar tumpah yang memakai badan jalan sebagai tempat berjualan. Mereka harus dilibatkan dalam merumuskan kebijakan lokasi dan relokasi tempat berjualan di pasar-pasar tradisional (terutama di kota besar).

- (6) Memberikan insentif keringanan pajak dan retribusi, paling tidak selama jangka waktu tertentu.

Perlu di tambahkan, bahwa diantara indikator analisis yang ada, terdapat indikator yang mutlak pengaruhnya (*fix*). Pada variabel MSDI ialah Diklat khusus, dan pada variabel KAP adalah indikator hibah, dan pada variabel KAE ialah indikator kemudahan perizinan usaha. Telah disimpulkan bahwa untuk memecahkan masalah kemiskinan ini, pemerintah daerah mutlak harus menyelenggarakan pendidikan dan latihan kerja khusus kepada keluarga miskin, memberikan hibah peralatan produksi yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya, serta kemudahan dibidang perizinan usaha.

Rancangan strategi pengentasan kemiskinan dari aspek ekonomi ini memiliki fokus kebijakan, yaitu melakukan penanganan pengentasan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi secara lintas wilayah pemerintahan kabupaten/ kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu menunjuk simpul-simpul pengembangan, misalnya : (a) Kota Parepare sebagai simpul pengembangan dari Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang. (b) Kota Makassar sebagai simpul pengembangan Pangkep, Maros, Gowa, dan Takalar. (c) Bantaeng sebagai simpul pengembangan Bulukumba , Jeneponto dan Selayar. (d) Watampone sebagai simpul pengembangan atas Kabupaten Sinjai, Wajo dan Soppeng. (e) Kota Palopo sebagai simpul pengembangan Kabupaten Tator, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Hinterland setiap kota simpul perlu diinventarisir potensi keunggulan komparatifnya. Misalnya : *Hinterland* Kota Parepare adalah daerah kantong beras, ikan laut, udang, ikan bandeng, dan sayur-mayur. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari setiap daerah terkait harus mampu merumuskan kebijakan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Bappeda sebagai perancang pembangunan daerah, selain memakai pendekatan *inward looking*, juga sudah harus pula memakai pendekatan *outward looking*. Mereka harus mampu bekerjasama untuk memecahkan masalah bersama dan mempercepat perputaran roda pembangunan di daerahnya masing-masing. Untuk menunjang program bersama itu, maka pengusaha di Parepare harus mampu mencari pasar ke luar Parepare (Kalimantan dan Jawa, termasuk alternatif ke Makassar) untuk memberikan kepastian pasar yang layak untuk produk yang dihasilkan oleh *hinterlandnya*. Disamping itu, dikota simpul, harus sudah tersedia

sarana prosesing pascapanen yang memadai. Apabila hal seperti itu dapat berjalan, maka kegiatan produksi di masing-masing kabupaten akan berjalan dengan baik, dan otomatis masyarakat miskin akan memperoleh manfaat, yaitu kesinambungan lapangan usaha. Usaha serupa harus pula dikembangkan pada kota simpul pembangunan lainnya.

Tujuan utama dari strategi ini adalah :

- a. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi warga miskin dibidang ekonomi.
- b. Mengurangi jumlah keluarga miskin, bahkan kalau mungkin menghi-langkan keluarga pra sejahtera.
- c. Menciptakan migrasi vertikal, peralihan lapangan kerja ke lapangan kerja yang lebih memberikan jaminan kesejahteraan.

2.2 Rekomendasi Kebijakan : Alasan Non-Ekonomi

Pengentasan kemiskinan dari sisi alasan non-ekonomi, disusun strategi pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten menyediakan fasilitas pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak atau keluarga miskin.
- b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten menyediakan layanan kesehatan murah sampai gratis tetapi bermutu kepada segenap warga miskin.
- c. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan RRI, TVRI, dan koran lokal untuk menyelenggarakan rubrik layanan informasi kepada warga pinggiran dan pedesaan sehingga dapat menjangkau pula para keluarga miskin yang tidak mampu memiliki akses informasi.

Dengan strategi ini, maka strategi peningkatan mutu sumberdaya insani akan tertunjang dengan sendirinya. Strategi pengentasan kemiskinan untuk alasan non-ekonomi ini, memiliki fokus berikut :

- a. Meningkatkan mutu keluarga dan masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam aktivitas kemasya-rakatan.

Pelaksanaan strategi pengentasan alasan non-ekonomi secara berkesinambungan ini diharapkan mencapai tujuan : Memutus rantai kemiskinan melalui pergeseran kehidupan anak-anak keluarga miskin ke sektor formal. Tujuan

memutus rantai kemiskinan ini adalah proses yang akan dicapai melalui cara mengawinkan program alasan non-ekonomi ini dengan program alasan ekonomi.

Tujuan memutus rantai kemiskinan ini diusahakan perwujudannya melalui aktivitas penyediaan layanan pendidikan gratis dan bermutu kepada anak-anak miskin serta kegiatan penerangan melalui RRI, TVRI dan koran lokal, tentang motivasi mencapai masa depan yang lebih baik melalui kerja keras. Anak-anak keluarga miskin yang telah selesai mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, setelah tamat SLTP, sekalipun lanjut ke SLTA, diberikan pelajaran ekstra tentang keterampilan. Latihan keterampilan ini, misalnya : cara membuat telur asin, memelihara lebah madu, tukang kayu, tukang batu, tukang tambal ban, menjahit, membuat manisan buah, dan sebagainya.

Anak-anak miskin yang telah selesai mengikuti pendidikan ekstra keterampilan terapan itu diarahkan untuk bekerja mandiri dengan membekalinya alat-alat kerja yang diperlukan serta modal kerja secukupnya yang bersumber dari fasilitas kredit mikro, kredit bergulir, dana taskin, dan sebagainya. Pendamping dan Penyuluh Lapangan bertugas untuk membimbing mereka, bagaimana mengelola usaha itu dengan baik, serta bagaimana membukukan transaksi, sekaligus mengatur pengembalian kredit. Melalui cara ini, rantai kemiskinan melalui keturunan akan dapat diputuskan.

Dana-dana Raskin, BLT, dan dana pengentasan lainnya, sebaiknya dialihkan penggunaannya ke program ini. Apabila program ini berhasil, maka anak-anak keluarga miskin dengan sendirinya akan dapat membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhannya. Tugas memberi raskin beralih dari pemerintah kepada anak-anak mereka yang telah bekerja mandiri.

Program Alasan Ekonomi + Program Alasan Non-Ekonomi = mencapai masyarakat madani yang seimbang dan sejahtera. Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya menangani dan mengatasi persoalan ekonomi mereka, tetapi juga persoalan non-ekonomi kaum miskin. Program ini bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin. Untuk itu, dalam usaha mencapai masyarakat madani yang seimbang dan sejahtera ini, disusun rancangan strategi berikut:

- a. Mewujudkan keluarga yang berkeseimbangan aspek material dan spiritualnya. Layanan perbaikan aspek spiritual ditangani melalui layanan pendidikan, layanan pemeliharaan kesehatan, layanan informasi melalui rubrik khusus di RRI, TVRI, dan koran lokal.

- b. Mewujudkan keluarga yang sadar akan masa depan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Untuk menopang program ini, maka dilingkungan mereka harus disediakan sarana rumah ibadah, seperti mushollah. Mushollah ini selain sebagai tempat beribadah, juga dipakai sebagai tempat penyuluhan, Taman Pendidikan Al Quran (TPA) kepada anak-anak keluarga miskin. Penyediaan bahan pelajaran (Buku TPA) dan guru dibebankan pada anggaran Pemkab/Pemkot atau instansi terkait.
- c. Mewujudkan keluarga yang sadar akan perawatan lingkungan hidup. Mereka melalui penyuluhan, ceramah agama dan program motivasi lain-nya, dibekali pengetahuan perlunya memelihara kebersihan lingkungan, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup demi melestarikan sumber daya alam yang dimiliki. Apabila Pemkot/Pemkab memiliki program reboisasi atau penghijauan lingkungan, maka mereka dianjurkan ikut berpartisipasi sebagai tenaga kerja reboisasi dan penghijauan.

Program di atas ini diarahkan untuk memiliki fokus kebijakan : Menjembatani usaha menciptakan pergeseran vertikal kehidupan keluarga ke jenjang yang lebih tinggi. Pergeseran dan perubahan keluarga Pra Sejahtera ke keluarga Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera III+.

Tujuan akhir program ialah tercapainya masyarakat madani yang berkecukupan, seimbang lahir dan batin, material dan spiritual.

Strategi di atas akan diefektifkan pelaksanaan dan perwujudannya melalui penerapan model penanggulangan yang disebutkan dalam Gambar 7, yaitu Rancangan Model Umum Pengentasan Kemiskinan Lintas Wilayah Pemerintahan Daerah. Model ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini kepada Gubernur untuk membentuk Forum Kerjasama Lintas Wilayah Pemerintah. Forum terdiri atas fungsionaris dibidang pembangunan dari daerah terkait, misal pada Model meliputi Kabupaten Pangkep, Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Takalar (Pamaminasata). Forum merupakan mediator untuk mempertemukan Asisten Bidang Pembangunan dan Bappeda, serta Dinas terkait untuk duduk bersama membicarakan program pengentasan kemiskinan yang akar masalah dan dampak akhirnya akan saling mempengaruhi daerah yang bersangkutan.

Forum selanjutnya membentuk Badan Bersama Pengentasan Kemiskinan yang Ketua dan anggota-anggotanya ditunjuk oleh Walikota/Bupati terkait. Badan memiliki fungsi dan tugas untuk :

- a. Menyusun rencana kerja pengentasan kemiskinan yang memiliki dampak keterkaitan antar wilayah pemerintahan, lengkap dengan rencana operasionalnya. Rencana yang spesifik untuk masing-masing wilayah pemerintahan akan disusun oleh lembaga yang bertanggungjawab di daerah itu.
- b. Menyusun langkah spesifik untuk melaksanakan rencana kerja dan rencana operasi yang sudah disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
- c. Melakukan evaluasi kemajuan pelaksanaan rencana taskin.
- d. Mengorganisir pertemuan rutin aparat teknis daerah terkait.

Untuk menggerakkan kaum miskin memecahkan masalah yang dihadapi, maka ditingkat pelaksanaan perlu dibentuk Kelompok Usaha Produktif yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Kelompok usaha ini sebaiknya dibicarakan ditingkat Desa/Kelurahan melalui media rembuk desa. Rembuk Desa dimaksudkan untuk menginventaris potensi yang ada, kapasitas masyarakat miskin, dan usaha yang layak dijalankan oleh mereka. Musyawarah sebaiknya melibatkan Karang Taruna dan Remaja Masjid setempat karena mereka pada umumnya banyak berhubungan serta dekat dengan masyarakat miskin. Setelah berhasil merumuskan jenis usaha yang akan dijalankan, ditunjuklah seorang diantara mereka sebagai Ketua Kelompok Usaha. Ketua Kelompok Usaha ini berkewajiban untuk mengorganisir pertemuan rutin (misalnya pertemuan bulanan), serta mendengarkan setiap saat keluhan dan saran seluruh anggota kelompoknya. Ketua Kelompok Usaha ini didampingi oleh tenaga sukarela dari Perguruan Tinggi dan atau LSM. Secara berkala (misalnya setiap minggu) dilakukan pertemuan antara Ketua Kelompok dengan Pendamping mereka untuk membicarakan berbagai saran yang diterima dari anggota. Rumusan dimatangkan dalam pertemuan berkala dimaksud untuk kemudian dibicarakan bersama dalam pertemuan bulanan anggota. Pertemuan bulanan ini dapat diorganisir dengan sistem arisan.

Untuk keperluan pembinaan, maka pemerintah setempat (Lurah atau Camat) dapat mengorganisir pertemuan untuk memilih Kelompok Usaha yang akan dijadikan

percontohan atau model di wilayahnya. Kelompok model ini diharapkan dapat menjadi patok-duga dari kelompok-kelompok usaha lain yang ada. Untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil produksi mereka, maka pemerintah mendorong dan memprakarsai Model Percontohan Unit Pemasaran, misalnya dengan membentuk Koperasi Pemasaran di ibukota kabupaten, dan atau di ibukota provinsi. Koperasi Pemasaran ini yang harus mencari kepastian pasar atas produk yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha yang ada.

Dinas terkait dengan pengentasan kemiskinan (misalnya Dinas Sosial, Dinas Perindag, BKKBN), menyelenggarakan program latihan kerja untuk memberikan keterampilan usaha dan bekerja mandiri kepada warga miskin (kepala keluarga atau anak-anak mereka yang putus sekolah). Program latihan kerja ini dilaksanakan secara berkelanjutan, dan bukan hanya sekedar basa basi politik belaka. Lulusan panti latihan kerja itulah yang diharapkan menjadi tenaga terampil pada Kelompok Usaha yang sudah dibentuk. Keberhasilan yang dicapai pada Kelompok Usaha Model atau Percontohan ditularkan kepada kelompok lainnya, sehingga diharapkan secara estapet dan berkesinambungan, keberhasilan itu menjadi milik semua kelompok usaha yang ada. Diharapkan model yang disajikan ini akan menjadi piranti yang bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara khusus, dari penelitian dimasing-masing daerah dijumpai saran spesifik dari responden warga miskin sebagai berikut :

- a. Di Kota Makassar, warga miskin di kawasan kumuh sangat mendambakan program pengentasan yang benar-benar dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Mereka berharap, Pemerintah Kota membantu membenahi fasilitas umum dilingkungan pemukiman mereka, terutama jalan setapak, lampu penerangan jalan, drainase, dan fasilitas air bersih. Mereka sangat setuju bila kepada mereka diberikan latihan kerja, dan anak usia kerja mereka yang putus sekolah diberikan latihan kerja informal untuk dapat mandiri (tambal ban, membuat telur asin, membuat manisan buah, membuat ikan asin, kerajinan yang memanfaatkan limbah industri atau barang bekas, dll sebagainya). Mereka butuh lapangan kerja dan kesempatan bekerja. Pasar tradisional ditata-ulang sehingga tidak terjadi pasar tumpah yang memakai badan jalan (Pasar Terong dan Pasar Sentral Pannampu). Bagaimana agar para pedagang sayur dilokasikan dibagian yang cocok untuk mereka, dan dijamin jalan akses yang

baik ke lokasi mereka sehingga alasan tidak terjangkau serta terasing dari pembeli dapat diatasi. Pedagang kaki lima agar diarahkan lokasi berjualannya, diberikan pembinaan, sehingga mereka berkesempatan mendapatkan lapangan kerja tanpa menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

- b. Di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Balusu berharap agar di Sungai Balusu dibuat bendungan agar sawah tadah hujan yang ada dapat diubah menjadi sawah berpengairan teknis. Mereka mendambakan perhatian pemerintah sekarang sama, atau bahkan supaya lebih baik dari pemerintah Orde Baru. Dizaman pemerintahan Orde Baru, pupuk murah dan mudah didapat, dan tersedia pada waktu dibutuhkan. Harga gabah terkendali dan ada kepastian pasar. Pada saat sekarang, pupuk mahal dan sulit didapat. Kadang-kadang nanti tersedia pada waktu tidak dibutuhkan lagi. Harga gabah tidak menentu, dan tidak ada pembeli yang pasti. Di kecamatan lain yang menjadi tempat penelitian dijumpai usulan dan pendapat yang sama. Diharapkan, saran mereka ini dapat ditindak-lanjuti oleh yang berwenang agar tercapai tujuan mensejahterakan rakyat.
- c. Di Kabupaten Soppeng petani mengeluhkan, Proyek Irigasi Langkemme sering longsor sehingga sumber air dan saluran induk irigasi tertimbun. Waktu yang diperlukan untuk menormalkan kembali cukup lama, enam sampai 10 bulan. Praktis apabila musibah itu terjadi, maka sawah ber-pengairan teknis yang ada di bawahnya akan berubah menjadi sawah tadah hujan. Akibatnya, dalam setahun petani hanya berkesempatan mengolah sawahnya satu kali (jika curah hujan cukup). Sehubungan dengan itu, petani menyarankan agar reboisasi dan penghijauan di daerah hulu dan sepanjang saluran induk irigasi digalakkan oleh pemerintah. Penghijauan sebaiknya dilakukan dengan menanam tanaman yang bermanfaat ganda, seperti pohon enau, kemiri, kaluwa, bambu, dan pohon rindang lainnya. Disamping itu, petani juga mengharapkan agar kebijakan pengadaan dan penyediaan pupuk dan obat-obat pertanian diusahakan sedemikian rupa sehingga minimal sama dengan di zaman Orde Baru.
- d. Di Kabupaten Jeneponto, masyarakat dan tokoh masyarakat menilai bahwa akar permasalahan kemiskinan ialah air. Sawah cukup luas, tetapi tergolong sawah tadah hujan. Delapan sungai yang ada hanya berair di- musim hujan dan kering dimusim kemarau. Pada waktu musim hujan, tenaga kerja musiman asal Jeneponto yang

menjalankan usaha informal di Kota Makassar (tukang becak, jual-jualan, buruh pelabuhan, dan lain lain) mudik untuk bertani. Tetapi selesai panen, mereka kembali ke Makassar untuk bekerja disektor informal. Tokoh masyarakat berpendapat, jika seandainya air pengairan tersedia seperti di daerah lain, maka kejadian seperti itu tidak akan terjadi dan sawah yang luas akan menjadi penyedia stok pangan lokal dan nasional. Mereka merekomendasikan dua hal, yaitu: (1) mengusahakan mencari air tanah yang mampu dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi seperti yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo di Gorontalo. Tidak tertutup kemungkinan, di bawah permukaan tanah yang gersang itu, ada mata air dengan potensi debit air yang tinggi. (2) Menggalakkan penghijauan di daerah hulu sungai dan di daerah yang strategis menurut penelitian lapangan yang diadakan. Kawasan hijau akan mampu menyerap dan menyimpan air hujan yang tercurah ke tanah dan mencegah banjir. Dengan penggalakan usaha penghijauan itu, maka kelak dikemudian hari, Jeneponto dapat berubah menjadi daerah pertanian yang subur. Kedua jenis program itu dapat dijalankan secara bersamaan, karena langkah yang pertama bersifat jangka pendek, dan yang kedua bersifat jangka panjang.

- e. Di Kabupaten Bone, petani gurem dan pengusaha kecil mengeluhkan kesulitan mendapatkan pinjaman modal kerja untuk berusaha. Bank yang ada semuanya meminta jaminan, sedang petani gurem dan pengusaha gurem sudah pasti tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan. Mereka berharap agar dapat memperoleh pinjaman modal usaha seperti yang diiklankan (kredit usaha mikro dan kecil, bebas jaminan untuk jumlah tertentu, dan disediakan sebagai modal usaha bagi kaum ekonomi lemah). Pembinaan pemerintah terhadap keluarga miskin diharapkan dapat meningkatkan dengan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi pedesaan, seperti : perbaikan irigasi, kemudahan memperoleh pasokan pupuk, jaminan harga gabah yang berimbang dengan ongkos produksi dan kebutuhan hidup, layanan pendidikan yang murah tetapi bermutu, pemban-nyakan proyek padat karya untuk memberikan lapangan kerja diluar sektor pertanian. Petani juga mengharapkan kemudahan untuk menda-patkan bibit tebu. Beberapa dekade yang lalu (sebelum hadirnya Pabrik Gula Bone), di Kabupaten Bone terdapat kerajinan membuat gula tebu cetakan. Gula tebu tersebut selain dijadikan sebagai barang substitusi kembang gula, juga dapat dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga sebagai pengganti gula merah (gula aren).

- f. Di Kabupaten Bantaeng, pengumpulan data dilakukan di daerah pertanian (Kecamatan Bisapu) dan di kawasan pesisir (Kecamatan Pajukukang). Nelayan mengeluhkan harga BBM yang mahal dan sering hilang dipasaran. Sebaliknya, harga ikan hasil tangkapan tetap murah sehingga kehidupan mereka bertambah sulit. Petani mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk dan obat-obat pertanian. Disamping itu, harganya mahal. Tidak seperti pada tahun 1970-an sampai 1990-an, harga pupuk terjangkau dan mudah diperoleh, sedang harga gabah baik dan ada pasar yang pasti (KUD).
- g. Di Kabupaten Sidrap, pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Mari-tenggae dan Watampulu. Petani tidak mengeluhkan pengairan. Tetapi pembinaan dari Penyuluh Lapang Pertanian dipandang tidak memadai. Para Penyuluh hanya datang sebentar berceramah, sesudah itu pergi tanpa memberikan contoh dan bimbingan teknis. Mereka mengusulkan agar pada setiap Kelompok Tani yang ada, ditempatkan seorang Penyuluh Teknis yang akan membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi, serta bagaimana mengembangkan pertanian mereka menjadi Mino-padi, dan lain lain.
- h. Di Kabupaten Tana Toraja pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Makale dan Rantepao. Para petani sawah mengeluhkan sulitnya mengolah sawah dengan hanya mencangkul. Untuk menyewa traktor, selain biayanya mahal, juga harus antri. Sehingga kadang-kadang, sawah sudah kering baru traktornya datang. Mereka mengharapkan agar pemerintah dapat menyerahkan hibah beberapa buah traktor dan pemanfaatannya diserahkan kepada Kelompok Tani. Kelompok Tanilah yang akan mengatur pemanfaatan/persewaan kepada semua anggota. Disamping itu mereka mengharapkan perhatian pemerintah terhadap jaminan penyediaan pupuk, obat-obat pertanian, serta stabilisasi harga gabah.
- i. Di Kabupaten Gowa, pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Bajeng dan Bontonompo. Mereka mengharapkan dukungan dana utamanya untuk usaha pembuatan batu bata dan usaha industri rumah tangga. Pada usaha pembuatan batu bata kesulitan dana untuk membeli bahan bakar (kayu dan sejenisnya), sehingga kebutuhan dana untuk usaha tersebut terpehuni melalui pinjaman pada pihak-pihak tertentu, dan menjaminkan batu batanya dengan harga yang sangat murah. Bagi usaha industri rumah tangga, mereka kesulitan dana untuk memasarkan produk-

produk yang dihasilkannya. Padahal menurut mereka produk-produk tersebut dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan didaerah atau lokasi lain, misalnya kalau produk-produk tersebut dipasarkan di toko-toko sekitar jalan Somba Opu Makassar. Disamping itu, mereka mengharapkan ada pembinaan dari instansi terkait dengan usaha yang mereka lakukan.

- j. Di Kota Pare-pare pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Bacukiki dan Soreang. Di Kecamatan Soreang terutama yang berlokasi di desa Lompoe yang sebagian besar masyarakatnya adalah Nelayan, mengharapkan disamping ada bantuan modal usaha, juga Nelayan mengeluhkan harga BBM yang mahal, sedangkan harga ikan, hasil tangkapan tetap murah sehingga kehidupan mereka bertambah sulit.

Atas dasar temuan itu, maka kerangka kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam usaha mengurangi jumlah warga miskin adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana produksi (alat-alat produksi) kepada warga miskin, misalnya di pedesaan berupa bantuan bibit unggul, dan alat-alat produksi lainnya sesuai pekerjaan mereka, termasuk di perkotaan.
- b. Membanyakkan proyek padat karya, sehingga warga miskin mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.
- c. Memperbaiki irigasi sehingga sawah tadah hujan dapat diubah menjadi sawah berpengairan teknis. Dengan demikian, kesempatan bekerja para petani di pedesaan bertambah. Diperkotaan, khususnya di kawasan pinggiran kota, dimana tersedia tanah Negara yang cukup, warga miskin dapat dilatih untuk bertani sayuran atau tanaman semusim, atau rumput hias, yang selama ini memiliki permintaan yang cukup tinggi di perkotaan.
- d. Menyediakan panti latihan kerja bagi keluarga miskin sesuai keahlian mereka untuk menjadi bekal dalam bekerja mandiri. Peningkatan keahlian ini akan berguna dalam menciptakan mobilisasi vertical penduduk miskin.

Strategi ini diharapkan akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang dibandingkan dengan system BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Kompensasi BBM. Sebab ternyata, BLT pada waktu sekarang ini justru banyak menimbulkan masalah baru.

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu dibentuk Forum Kerjasama Lintas Wilayah Pemerintahan yang merupakan media untuk mempertemukan Asisten Bidang Pembangunan dan Bappeda, serta Dinas terkait untuk duduk bersama membicarakan program pengentasan kemiskinan yang akar masalah dan dampak akhirnya akan saling mempengaruhi daerah yang bersangkutan.

Untuk menggerakkan kaum miskin memecahkan masalah yang dihadapi, maka ditingkat pelaksanaan perlu dibentuk Kelompok Usaha Produktif yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing keluarga miskin dan daerah. Kelompok usaha ini sebaiknya dibicarakan ditingkat Desa/Kelurahan melalui media rembuk desa. Rembuk Desa dimaksudkan untuk menginventaris potensi yang ada, kapasitas masyarakat miskin, dan usaha yang layak dijalankan oleh mereka. Musyawarah sebaiknya melibatkan Karang Taruna dan Remaja Masjid setempat karena mereka pada umumnya banyak berhubungan serta dekat dengan masyarakat miskin. Setelah berhasil merumuskan jenis usaha yang akan dijalankan, ditunjuklah seorang di antara mereka sebagai Ketua Kelompok Usaha. Ketua Kelompok Usaha ini berkewajiban untuk mengorganisir pertemuan rutin (misalnya pertemuan bulanan), serta mendengarkan setiap saat keluhan dan saran seluruh anggota kelompoknya. Ketua Kelompok Usaha ini didampingi oleh tenaga sukarela dari Perguruan Tinggi dan atau LSM. Secara berkala (misalnya setiap minggu) dilakukan pertemuan antara Ketua Kelompok dengan Pendamping mereka untuk membicarakan berbagai saran yang diterima dari anggota. Rumusan dimatangkan dalam pertemuan berkala dimaksud untuk kemudian dibicarakan bersama dalam pertemuan bulanan anggota. Pertemuan bulanan ini dapat diorganisir dengan sistem arisan.

Untuk keperluan pembinaan, maka pemerintah setempat (Lurah atau Camat) dapat mengorganisir pertemuan untuk memilih Kelompok Usaha yang akan dijadikan percontohan atau model di wilayahnya. Kelompok model ini diharapkan dapat menjadi patokduga dari kelompok-kelompok usaha lain yang ada.

Untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil produksi mereka, maka pemerintah mendorong dan memprakarsai Model Percontohan Unit Pemasaran, misalnya dengan membentuk Koperasi Pemasaran di ibukota kabupaten, dan atau di ibukota provinsi. Koperasi Pemasaran ini yang harus mencari pasar atas produk yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha warga miskin yang sudah dibentuk.

Dinas terkait dengan pengentasan kemiskinan (misalnya Dinas Sosial, Dinas Perindag, BKKBN), menyelenggarakan program latihan kerja untuk memberikan keterampilan usaha dan bekerja mandiri kepada warga miskin (kepala keluarga atau anak-anak mereka yang putus sekolah). Program latihan kerja ini dilaksanakan secara berkelanjutan, dan bukan hanya sekedar basa basi politik belaka. Lulusan panti latihan kerja itulah yang diharapkan menjadi tenaga terampil pada Kelompok Usaha yang sudah dibentuk. Keberhasilan yang dicapai pada Kelompok Usaha Model atau Percontohan ditularkan kepada kelompok lainnya, sehingga diharapkan secara estapet dan berkesinambungan, keberhasilan itu menjadi milik semua kelompok usaha yang ada.

Fokus kebijakan harus diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan. Maksudnya, apabila orang tua keluarga miskin sudah sulit untuk diubah pola pikir dan motivasi mandirinya, maka anak-anak mereka harus dikeluarkan dari lilitan kemiskinan. Anak-anak mereka dilatih oleh Dinas terkait yang didanai dari dana APBN dan APBD.

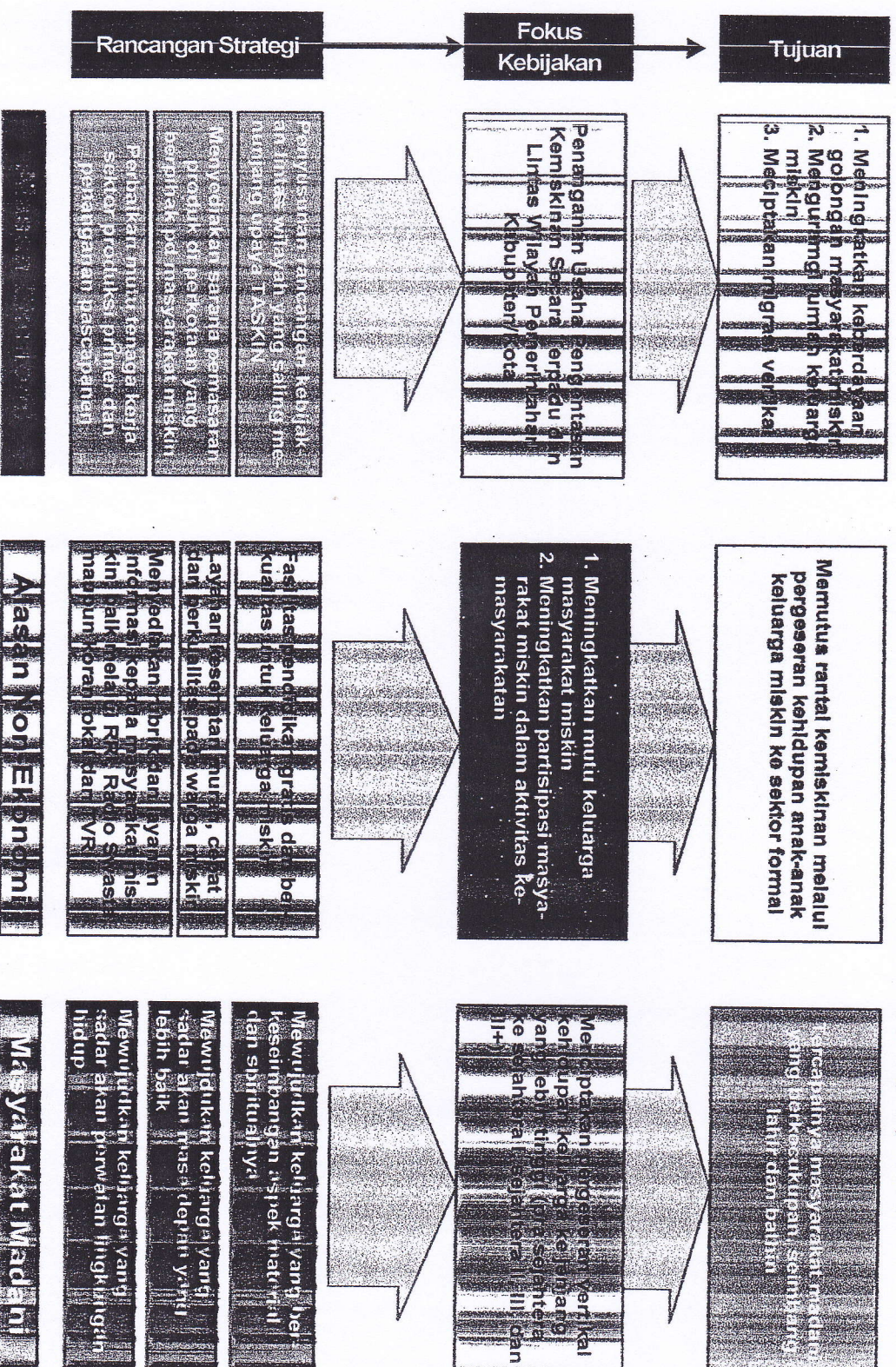
Sepanjang memungkinkan, tiap Pemerintah Kabupaten dan Kota menggalakkan kegiatan pengumpulan zakat, sadaqah, infaq dan waqaf melalui Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Dana sebahagiannya dapat dipakai untuk mendirikan badan usaha atau koperasi yang bergerak dibidang produksi tertentu, seperti : Penjahitan, Pembuatan Kue Kering, Pembuatan Telur Asin, Pembuatan Ikan Asin, dan lain lain, dimana tenaga kerjanya direkrut dari anak-anak keluarga miskin yang sudah dilatih. Produksinya dijual oleh Lembaga Pemasaran yang sudah dibentuk, baik di dalam kabupaten/kota yang bersangkutan atau pun ke ibukota provinsi, dan bahkan ke luar provinsi. Dengan strategi dan model memutus rantai kemiskinan ini, maka program pengentasan kemiskinan akan lebih efektif. Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan, bahwa untuk mengatasi kemiskinan, berikanlah kepada warga miskin itu peralatan kerja dan bantulah mereka memasarkan hasilnya, kemudian ikuti perkembangan usahanya. (Diangkat dari kisah seorang kepala keluarga miskin yang masih muda, tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, siapa di antara mereka yang ikhlas membantu yang bersangkutan dengan alat-alat kerja. Seorang sahabat bersedia menyumbang sebuah kapak dan yang lainnya seutas tali. Rasulullah menyerahkan alat kerja itu kepada kepala keluarga miskin tadi, dan memberinya petunjuk, Anda ke hutan mencari kayu bakar, kemudian menjualnya

ke pasar. Tiap pekan, Anda laporkan perkembangan pekerjaan Anda itu kepada saya (Rasulullah)). Itulah contoh model pengentasan berbasis pemutusan rantai kemiskinan.

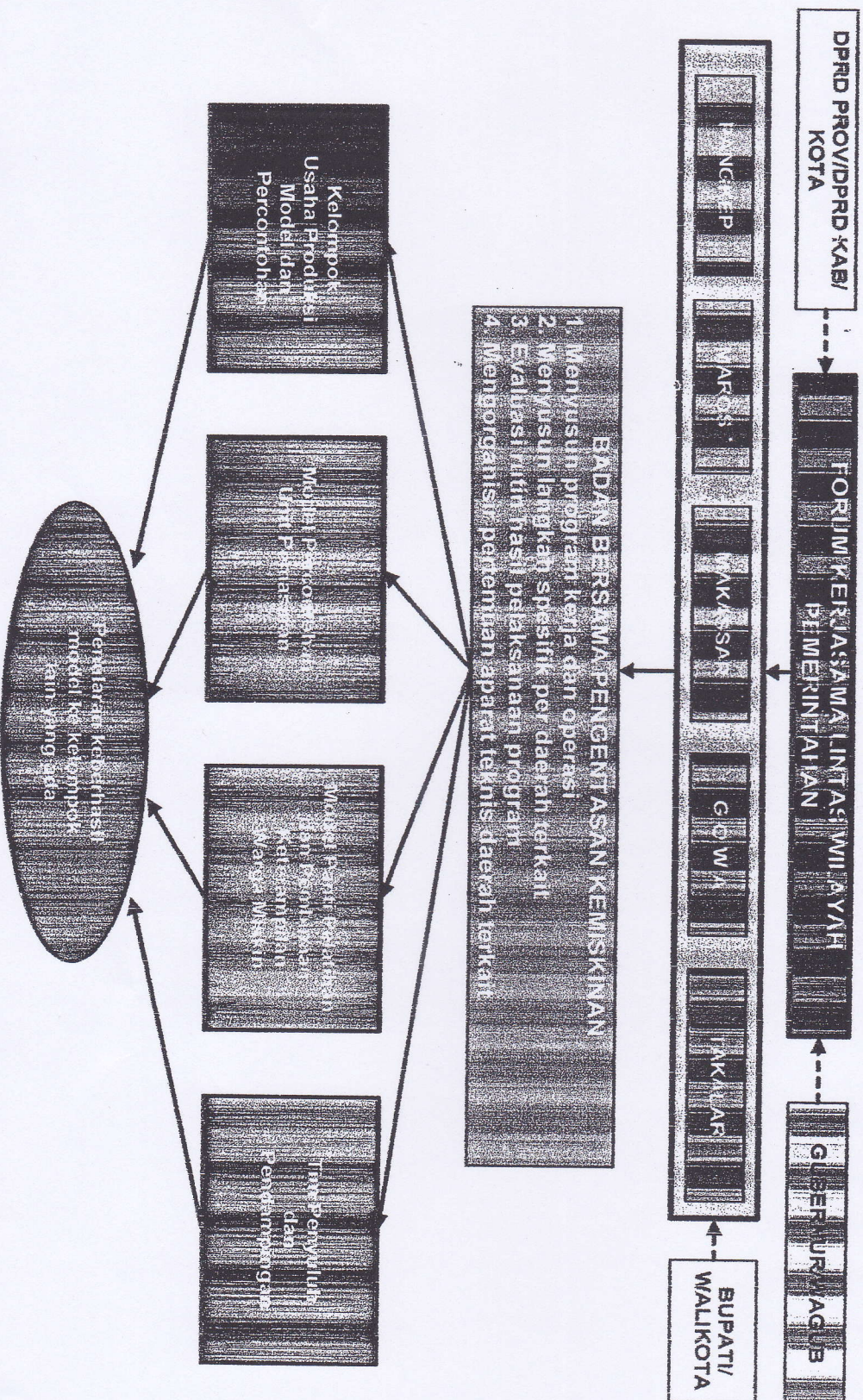
Inti dari model dan strategi ini ialah :

- a. Melengkapi warga miskin dengan alat kerja produktif yang bersifat hibah (pemberian).
- b. Memberi mereka petunjuk kerja, jika perlu melalui latihan
- c. Ada proses monitoring mingguan untuk mengevaluasi kemajuan usaha pengentasan.
- d. Tindak lanjut atas umpan balik pelaksanaan program.

Gambar 6. Rancangan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menuju Masyarakat Madani yang Sejahtera



Gambar 7. Rancangan Strategi Pengentasan Kemiskinan Lintas Wilayah Satuan Pemerintahan Daerah



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab demi bab, khususnya dari bab hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Faktor mutu sumber daya insani, ketersediaan alat produksi, dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk mengurangi , dan atau mengentaskan keluarga miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, harus dilakukan usaha peningkatan mutu sumberdaya insani, menyediakan alat-alat produksi dan meningkatkan keterlibatan keluarga miskin dalam aktivitas ekonomi.
2. Berdasarkan atas analisis faktor konfirmatori, variabel pendidikan dan latihan khusus, hibah peralatan produksi, dan kemudahan perizinan usaha merupakan variabel yang memiliki signifikansi yang fix (mutlak). Dengan demikian untuk mengurangi dan atau mengentaskan keluarga miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah mutlak harus menye-lenggarakan latihan khusus kepada keluarga miskin yang memungkin-kan mereka bekerja mandiri (keterampilan tempel ban, membuat telur asin, kerajinan memanfaatkan benda bekas, dan lain-lain). Keluarga miskin harus dibantu peralatan produksi dalam bentuk hibah, khususnya kepada kelompok usaha yang dibentuk untuk itu, sehingga peralatan itu dapat dimanfaatkan bersama melalui kelompok usaha. Keluarga miskin harus memiliki kemudahan akses untuk berusaha, dan karena itu, sebagian stand di pasar tradisional, harus disediakan untuk keluarga miskin untuk menjalankan kegiatan usaha informal (menjual sayuran atau bahan kebutuhan sehari-hari dalam skala kecil).
3. Untuk mengefektifkan usaha pengurangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi harus menerapkan strategi pengentasan lintas unit pemerintahan di daerah melalui suatu forum bersama yang dibentuk untuk suatu kawasan tertentu, dan tidak secara parsial per unit pemerintahan di daerah seperti sekarang. Untuk Kota Makassar dan sekitarnya, forum bersama dapat mencakup Kabupaten Pangkep, Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Takalar. Urbanisasi terjadi karena daya tarik ekonomi kabupaten sekitar Kota Makassar

kecil. Urbanisasi akan menimbulkan dampak sosial yang cenderung meningkatkan jumlah keluarga miskin. Untuk itu, harus ada kebijakan lintas unit pemerintahan yang dirumuskan bersama melalui forum bersama yang dibentuk untuk meningkatkan daya tarik dan daya serap dimasing-masing kabupaten sekitar Kota Makassar. Disamping itu, Kota Makassar sebagai kota tujuan pemasaran produk primer (sayur mayur dan bahan kebutuhan sehari-hari lainnya) harus mampu menyediakan sarana pemasaran yang layak karena didalam kelompok penjual informal itu, terkait keluarga miskin yang akan dientaskan.

4. Model pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan kebutuhan khas daerah yang bersangkutan, dan tidak mendasarkan usaha pengentasan, itu melalui suatu program yang seragam. Model pengentasan yang diterapkan selama ini kelihatan kurang efektif karena jumlah keluarga miskin (pra sejahtera) meningkat dan jumlah keluarga Sejahtera III serta Sejahtera III+ mengalami penurunan di sebagian besar Kabupaten/Kota.

B. Saran

Memperhatikan hasil penelitian dan pembahasannya, serta kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran penelitian sebagai berikut :

1. Memberdayakan Badan Amil Zakat (Bazis) yang ada di masing-masing kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyalurkan peralatan produktif dan modal bersyarat lunak (*qardhul hasan*) kepada keluarga miskin. Dana masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang dihimpun melalui Bazis, dapat dipakai untuk menjalankan model pengentasan berupa pemutusan rantai kemiskinan seperti yang dijalankan di Malaysia. Anak-anak keluarga miskin yang memenuhi syarat direkrut untuk disekolahkan dan diberikan latihan keterampilan untuk dapat bekerja mandiri. Biaya pendidikan dan latihan itu dibayarkan dari Dana Bazis. Kelak dikemudian hari, anak-anak keluarga miskin akan memutar haluan dan berubah menjadi keluarga sejahtera karena telah memiliki pekerjaan tetap. Penekanan program ialah kepada pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya insani anak-anak keluarga miskin.
2. Keluarga miskin yang sudah dilatih untuk menjalankan usaha tertentu diorganisir dalam suatu kelompok usaha untuk memudahkan pembinaan dan koordinasi.

Tenaga sukarela dari LSM dan Perguruan Tinggi dapat diperbantukan sebagai tenaga pendamping pada kelompok usaha yang sudah dibentuk.

C. Implikasi Kebijakan

Implementasi model dan strategi pengentasan kemiskinan yang direkomendasikan, diharapkan akan mewujudkan berbagai maslahat (*benefit*) sebagai berikut :

1. Keluarga miskin akan memperoleh kesempatan berusaha sesuai potensi insaniahnya. Dengan demikian, keluarga miskin tersebut tidak perlu lagi menggantungkan diri kepada belas kasihan pihak lain, termasuk kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Segenap keluarga miskin sudah dapat berdiri sendiri di atas usaha yang dikelolanya. Untuk keperluan itu, pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), perlu menyediakan bantuan modal awal dalam APBN dan atau APBD.
2. Anak-anak keluarga miskin memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi, minimal sampai tamat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Kejuruan Tingkat Menengah. Dengan mengikutkan anak-anak keluarga miskin dalam program latihan keterampilan kerja, baik sewaktu selesai mengikuti program wajib belajar sembilan tahun (tamam SMP), atau pun sesudah menyelesaikan studi di SLTA, maka anak-anak keluarga miskin akan memiliki modal insaniah untuk membuka usaha sendiri, atau menjadi tenaga kerja di sektor formal dan informal. Kebijakan ini akan mengurangi angka-angka pengangguran.
3. Melalui pemberdayaan Badan Amil Zakat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dana yang berhasil dikumpulkan, sebagian (misalnya sekitar 50%) dipakai untuk mendirikan perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Usaha Keluarga Miskin. Untuk menjamin keberhasilan program, maka pemerintah menunjuk tenaga pendamping (sebagai konsultan manajemen dan bisnis) untuk mendampingi Ketua Kelompok Usaha yang sudah dibentuk. Tenaga pendamping direkrut dari Perguruan Tinggi melalui seleksi yang dirancang khusus untuk keperluan itu untuk menjamin, agar tenaga pendamping dimaksud memiliki kemampuan sebagai konsultan manajemen dan bisnis.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan untuk memasarkan hasil produksi Kelompok Usaha Keluarga Miskin, baik di dalam wilayah kabupaten/kota setempat, atau pun ke luar kabupaten/kota tempat domisilinya. Melalui pemberian bantuan dimaksud, hasil produksi Kelompok Usaha Keluarga Miskin akan memiliki jaminan kepastian pasar.
5. Badan Usaha Milik Negara dan atau Milik Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Swasta memberikan kesempatan kepada Kelompok Usaha Keluarga Miskin, untuk menjadi unit usaha binaan. Melalui pembi-naan BUMN/BUMD/BUMS yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih besar, akan mendorong terjadinya alih pengetahuan dan keterampilan. Pada gilirannya nanti, kelompok usaha yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk tumbuh serta berkembang menjadi badan usaha yang kuat dan tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. **Kerangka Acuan Kegiatan Litbang Tahun 2005**, Balitbang Prop. Sulsel.
- Anonim. 2003. **Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003.**, Buku 1 Provinsi, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Anonim. 2003. **Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003.**, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
- Anonim. 2003. **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan Tahun 2003.**, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan
- Amin Rais, 1995, **Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia**, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Cahyat, Ade. 2004. **Bagaimana Kemiskinan Diukur? : Beberapa Model Per-hitungan Kemiskinan di Indonesia**. Forest and Governance Programme, Center for International Forestry Research, November 2004, Volume Nomor 2
- Chambers, Robert., 1987. **Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang.**, LP3ES, Jakarta.
- Dendi, Astia; H.J. Heile, Mahman, Rukyatil Hilaliyah dan Rifai Saleh Haryono. 2004. **Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal : Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara**. Promis-NT, Penanggulangan Kemiskinan dan Dukungan Pemerintah Daerah di NTB dan NTT (Edisi Desember, 2004)
- Ferdinand, Augusty (2000). "Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis S2 dan Disertasi S3", Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldthorpe, J.E., 1992., **Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan.**, Jakarta, Gramedia
- Hair, J. F., Jr., Rolph, E. A., Romald, L. T., dan William , G.B, 1998. "**Multivariate Data Analysis**", Fifth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Heile, Hainz Josef dan Astia Dendi. 2004. **Agroprosesing dan Pemasaran : Pendekatan dan Strategi Menanggulangi Kemiskinan**. Promis-NT, Penanggulangan Kemiskinan dan Dukungan Pemerintah Daerah di NTB NTT (Edisi Agustus, 2004)
- Ismawan, Bambang, 1992, **Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan**, (Tinjauan Kearah Persepsi Yang Utuh), LP3ES, Jakarta.

- Karnaji dan Bagong, 2000. *Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Surabaya*. Penerbit Lutfansah Mediatama, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Surabaya
- Masoed, Mochtar, 1993. *Ekonomi politik Pembangunan dan Pemberdayaan Rakyat , Dalam Prospektif Volume 5 No. 1 dan 2*, PPSK, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, P3PK, UGM, Yogyakarta.
- Mursi, Abdul Hamid, 1997, *SDM yang Produktif (Pendekatan Al-Qur'an dan Sains)*, Gema Insani Press, Jakarta
- Nugroho, Heru, 1995, *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Rahardjo, Dawan, 1992, *Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi*, PT. Pustaka, LP3ES, Jakarta.
- Soejatmoko, 1986, *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*, Tiara Wacana, Jakarta
- Soemardjan, Selo., 1984. *Land Reform Di Indonesia, Dalam Dua Abad Penguasaan Tanah.*, Gramedia, Jakarta
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong & Karnaji, 2001. *Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Surabaya*, Cetakan Pertama, Surabaya
- Suyanto, Bangong. 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta
- Tadjuddin Noer Effendi, 1995, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1999. *Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993, *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Makalah untuk Seminar Bulanan P3PK UGM, Yogyakarta